

**LEGALITAS SAKSI VERBALISAN DALAM PEMERIKSAAN DI
PERSIDANGAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**ARINTYA YOGANTARI MULYOTO
NIM :145010107111037**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

LEGALITAS SAKSI VERBALISAN DALAM PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

ARINTYA YOGANTARI MULYOTO
NIM : 145010107111037

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 7 Juni 2018
dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Prija Djatmika, SH., MS.

Eny Harjati, SH., MH.

NIP. 19611116 198601 1 001

NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si

Dr. Yuliati, SH., L.L.M

NIP. 19620805 198802 1 001

NIP. 19660710 199203 2 003

IDENTITAS PENGUJI

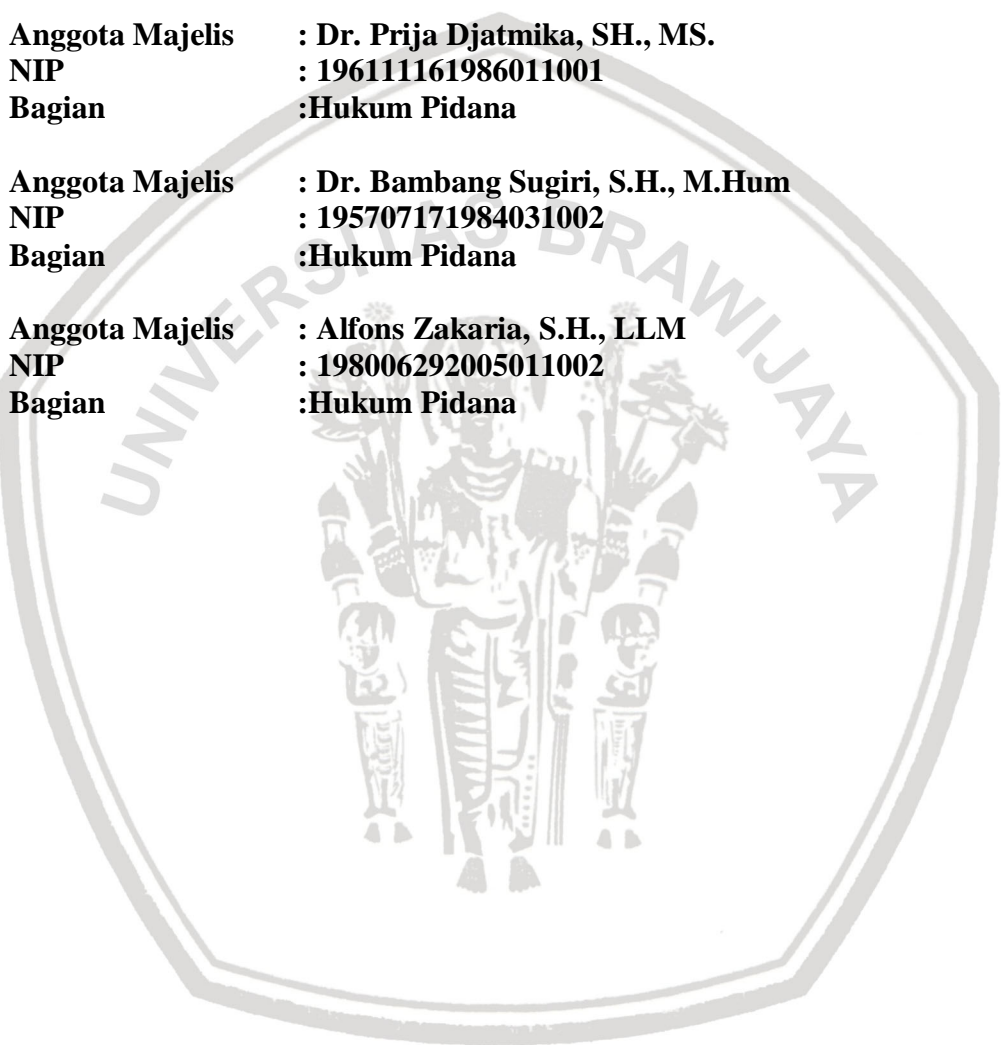
Ketua Majelis : Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S
NIP : 195409251980031002
Bagian : Hukum Pidana

Sekretaris Majelis : Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H
NIP : 198408162015042002
Bagian : Hukum Pidana

Anggota Majelis : Dr. Prija Djatmika, SH., MS.
NIP : 196111161986011001
Bagian : Hukum Pidana

Anggota Majelis : Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.Hum
NIP : 195707171984031002
Bagian : Hukum Pidana

Anggota Majelis : Alfons Zakaria, S.H., LLM
NIP : 198006292005011002
Bagian : Hukum Pidana





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 453/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : ARINTYA YOGANTARI MULYOTO
NIM : 145010107111037
Judul : LEGALITAS SAKSI VERBALISAN DALAM PEMERIKSAAN DI
PERSIDANGAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Mei 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,



ISSUED
PLAGIASI FH UB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

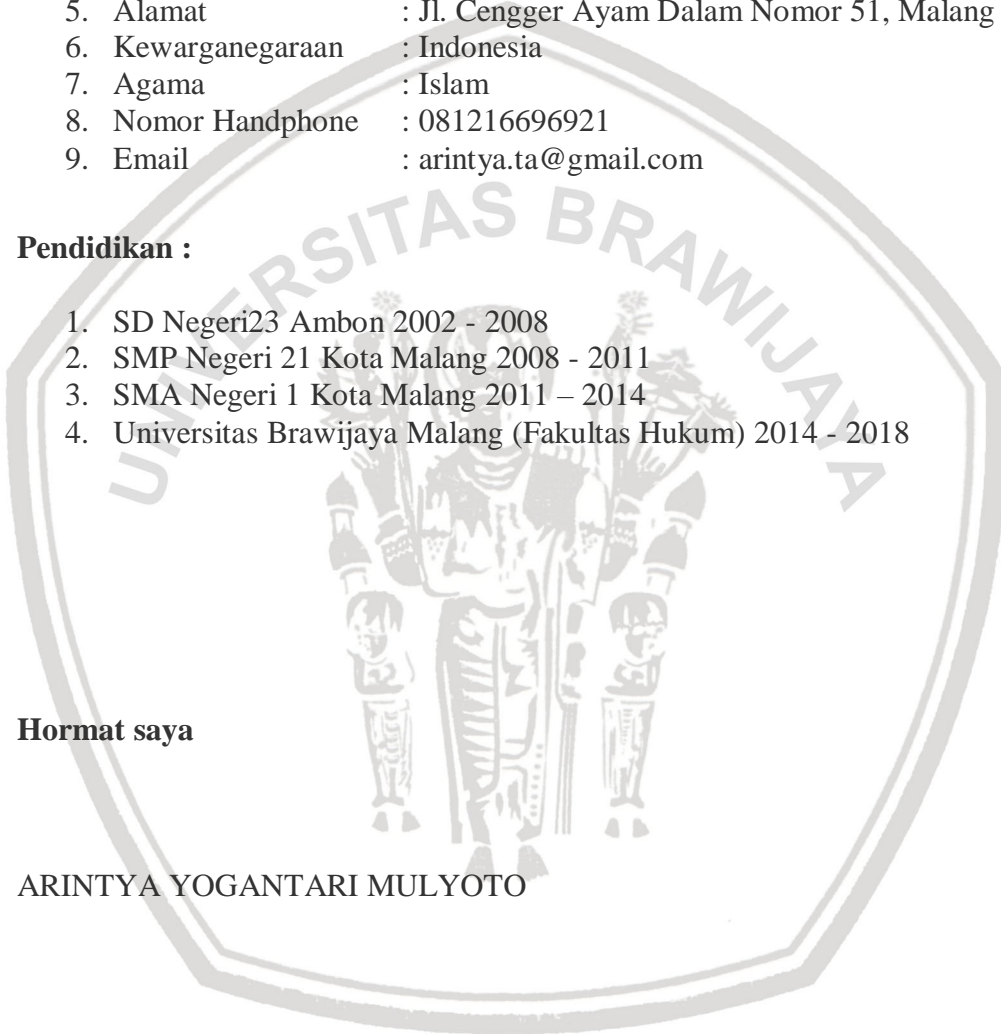
1. Nama : Arintya Yogantari Mulyoto
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir: Polewali, 2 November 1996
4. Status : Belum Kawin
5. Alamat : Jl. Cengger Ayam Dalam Nomor 51, Malang
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Nomor Handphone : 081216696921
9. Email : arintya.ta@gmail.com

Pendidikan :

1. SD Negeri23 Ambon 2002 - 2008
2. SMP Negeri 21 Kota Malang 2008 - 2011
3. SMA Negeri 1 Kota Malang 2011 – 2014
4. Universitas Brawijaya Malang (Fakultas Hukum) 2014 - 2018

Hormat saya

ARINTYA YOGANTARI MULYOTO



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan tuntunan-Nya tiada henti hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik materiil maupun moril, berkat bantuannya segala kendala dapat penulis atasi.

Dengan rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua dan kakak penulis yang tidak pernah lelah mendengarkan curahan hati penulis, memberikan doa, semangat, motivasi, nasehat, serta dukungan moril dan materiil kepada penulis.
2. Bapak Dr. Rahmad Syafaat, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Yuliati, SH., L.LM, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Dr. Prija Djatmika, SH., MS., selaku dosen pembimbing utama yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan saran, serta membimbing penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Eny Harjati, SH., MH., selaku dosen pembimbing pendamping yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan arahan, membantu, mengingatkan, selalu sabar, memberikan saran, mendengarkan keluh kesah penulis dan membimbing penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan kepada penulis guna memperbaiki skripsi penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya Dosen- Dosen Konsentrasi Hukum Pidana yang telah membagi ilmu, arahan, dan pengetahuan yang bermanfaat serta kepada penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah membantu dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi penulis.
9. Sahabat seperjuangan yang selalu mendengar keluh kesah penulis, Nadya Charisty Wijanarko, Irylna Datu Leksono, Febriani Tri Putri, Karlinda Lingga Sari, Irene Fransisca Liemanto, Novia Dewi yang tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesah, memberikan motivasi, semangat, doa, menenangkan dalam segala situasi, dan selalu sabar menghadapi penulis saat penulis membutuhkan.
10. Sahabat penulis semasa SMA, Dhanyta Fitriani, Merlin Pandiangan, Nadya Ferina
11. Sahabat penulis semasa SMP, Aliffah Yuni Sari, Fitri Fauziah
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya teman-teman seperjuangan Skripsi dan Teman HIMAKOPI, yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya. Terima

kasih banyak atas semua bantuan, dukungan ataupun motivasi yang telah diberikan pada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum.

Tak ada gading yang tak retak, pepatah tersebut tepat untuk menggambarkan skripsi penulis yang jauh dari kesempurnaan, terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Maka dari itu berbagai saran serta kritik membangun sangat diharapkan dalam menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata penulis memohon maaf apabila dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis berharap dengan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kalangan akademis lainnya.

Malang, Mei 2018

Penulis,

Arintya Yogantari Mulyoto



**LEGALITAS SAKSI VERBALISAN DALAM PEMERIKSAAN DI
PERSIDANGAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA**

**Arintya Yogantari Mulyoto, Dr. Prija Djatmika, S.H.,M.S, Eny Harjati,
S.H.,M.H**

Jurusan Ilmu Hukum, F. Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
Email: arintya.ta@gmail.com

ABSTRAK

Judul ini diambil terkait dengan keabsahan dari diajukan saksi verbalisan dalam pemeriksaan di persidangan yang mana pengaturan mengenai saksi verbalisan tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya. Ada beberapa masalah penelitian yang disajikan: 1. Apakah pemanggilan saksi verbalisan dalam pemeriksaan di persidangan sudah sesuai dengan hukum acara pidana? 2. Apakah keterangan saksi verbalisan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi?

Penulis menggunakan metode yuridis normatif bersama dengan pendekatan undang-undang, sedangkan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diikuti oleh teknik penelusuran bahan hukum yaitu studi kepustakaan, serta menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan saksi verbalisan telah sah dan sesuai dengan pemeriksaan saksi pada umumnya yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan mengacu pula pada Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai perluasan makna saksi. Nilai kekuatan pembuktian dari keterangan yang disampaikan oleh saksi verbalisan bersifat bebas, artinya tergantung pada kebijaksanaan hakim.

Kata Kunci: Legalitas Saksi Verbalisan, Pemeriksaan di Pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

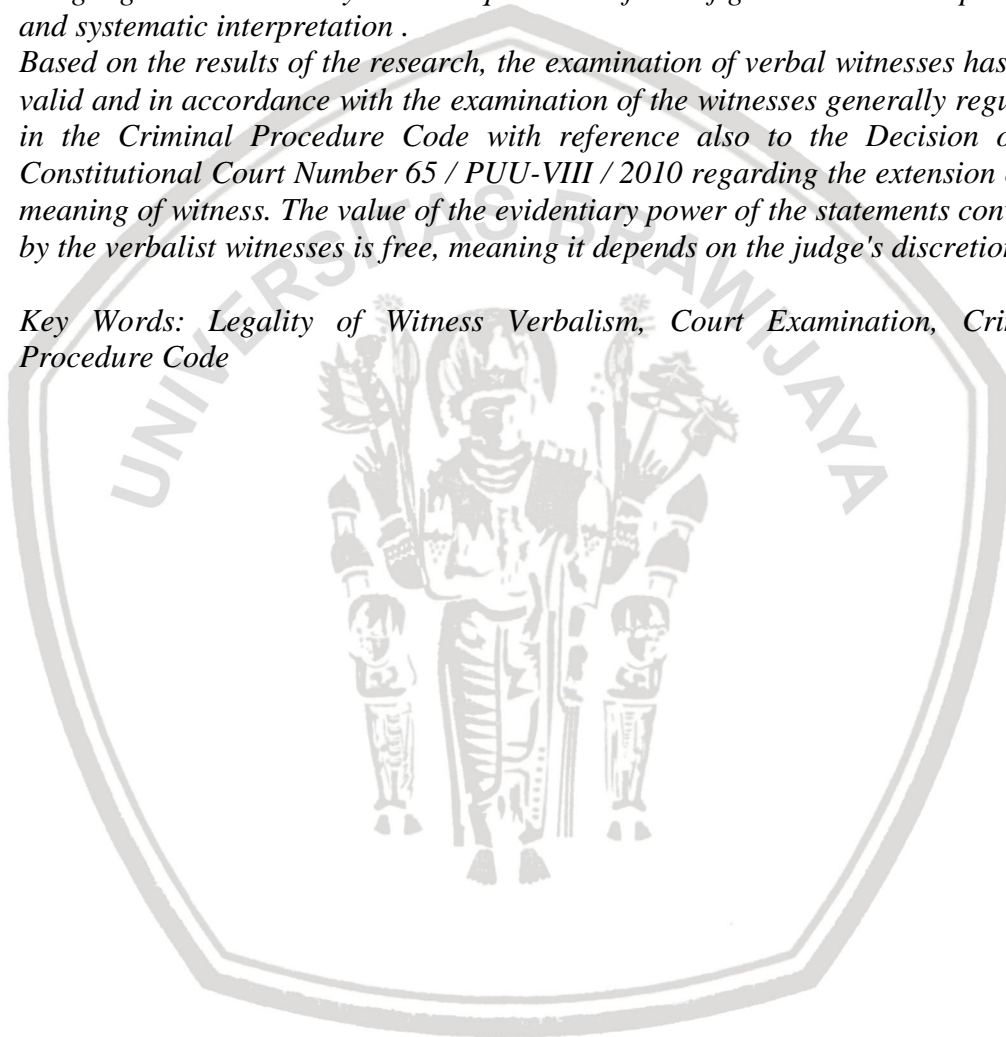
ABSTRACT

This title is taken in relation to the validity of the verbal-witness in the trial in which the arrangement of the verbal witness is not regulated in the Criminal Procedure Code or any other legislation. There are several research problems presented: 1. Is the calling of a verbal witness in a hearing in a hearing in accordance with the criminal procedure law? 2. Does the testimony of a verbalist witness have the value of evidentiary power as evidence of witness testimony?

The author uses the normative juridical method along with the law approach, while the legal material used consists of primary, secondary, and tertiary legal materials, followed by legal material searching techniques, library studies, and using legal material analysis techniques in the form of grammatical interpretation and systematic interpretation .

Based on the results of the research, the examination of verbal witnesses has been valid and in accordance with the examination of the witnesses generally regulated in the Criminal Procedure Code with reference also to the Decision of the Constitutional Court Number 65 / PUU-VIII / 2010 regarding the extension of the meaning of witness. The value of the evidentiary power of the statements conveyed by the verbalist witnesses is free, meaning it depends on the judge's discretion.

Key Words: *Legality of Witness Verbalism, Court Examination, Criminal Procedure Code*



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
SUMMARY.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Saksi.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Saksi Verbalisan.....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana.....	29
E. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Sumber Bahan Hukum.....	46
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	49
E. Analisis Bahan Hukum.....	50
F. Definisi Konseptual.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	
A. Pemanggilan Saksi Verbalisan/Penyidik dalam Pemeriksaan di Persidangan.....	52
B. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Verbalisan.....	89
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Penelitian Terdahulu...	10
-----------	-------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
- Lampiran 3. Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk
Kepentingan Akademisi
- Lampiran 4. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
- Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana yang berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Sistem peradilan pidana menunjukan cara kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem yaitu pendekatan yang menggunakan semua unsur yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan dan saling berhubungan serta saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam sistem peradilan pidana sendiri, terdapat komponen-komponen yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal maupun dalam praktik penegakan hukum. Salah satu dari komponen sistem peradilan pidana tersebut yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah merupakan fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum, pengayoman, perlindungan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan pada

masyarakat. Hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Polisi memiliki tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum, salah satunya yaitu bertugas sebagai penyidik dalam tindak pidana yang terjadi.¹ Sebagai seorang penyidik, polisi berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam penyidikan guna memperoleh bukti-bukti atas suatu tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya. Kewenangan sebagai seorang penyidik tersebut tidak hanya diberikan kepada anggota Kepolisian melainkan juga merupakan kewenangan yang diberikan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang tersendiri oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Apabila penyidikan tersebut dilakukan oleh PPNS tertentu, maka sejak laporan/pengaduan diterimanya wajib memberitahukan kepada penyidik anggota kepolisian. Dalam rangka koordinasi dan pengawasan maka PPNS diwajibkan pula untuk melaporkan kepada penyidik anggota kepolisian mengenai proses penyidikannya beserta bukti-bukti yang telah ditemukannya. Hasil dari penyidikan yang dilakukan baik oleh anggota Kepolisian maupun PPNS kemudian dibuat dalam berita acara untuk setiap tindakan tentang:²

¹ Pasal 6 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

² Pasal 75 ayat (1) KUHAP

1. Pemeriksaan tersangka
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Pemasukan rumah
6. Penyitaan benda
7. Pemeriksaan surat
8. Pemeriksaan saksi
9. Pemeriksaan di tempat kejadian
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan

Berita acara pemeriksaan (BAP) dikategorikan sebagai isi berkas perkara³. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik terhadap saksi maupun tersangka untuk mendapatkan keterangan mereka yang dituangkan dalam BAP. Hal ini bertujuan guna menjadikan suatu perkara lebih jelas sehingga peran seseorang ataupun barang bukti pada peristiwa pidana yang terjadi semakin jelas.

Dalam pembuatan BAP terhadap pemeriksaan saksi, Yahya Harahap menjelaskan bahwa keterangan yang dikemukakan pihak yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan penyidikan, dilakukan pencatatan dengan teliti oleh penyidik dalam BAP dengan menggunakan prinsip yaitu dicatat sesuai dengan setiap kata yang dipergunakan oleh saksi.⁴ Yahya Harahap menjelaskan lebih

³ Pasal 8 ayat (2) KUHP

⁴ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 143.

lanjut bahwa BAP yang berisi keterangan saksi tersebut ditandatangani oleh saksi dan juga penyidik yang harus memperhatikan 2 hal yaitu:⁵

1. Saksi menandatangani BAP setelah lebih dulu isi berita acara tersebut disetujuinya

Yahya Harahap menjelaskan, cara terbaik adalah menyuruh saksi untuk melafalkannya sendiri, jika mereka pandai membaca. Namun jika dia tidak bisa membaca, maka penyidiklah yang membacakan berita acara dihadapan saksi.

2. Undang-undang memberikan kemungkinan kepada saksi tidak menandatangani BAP

Ketika saksi tidak mau menandatangani BAP, penyidik dapat membuat catatan mengenai alasan ketidakmauan saksi tersebut dalam berita acara.

Catatan tersebut berisi alasan yang menjadi sebab saksi menolak memberikan tanda tangan dalam BAP. Alasan yang diberikan oleh saksi haruslah alasan yang kuat mengenai ketidakmauan saksi untuk menandatangani BAP tersebut.

BAP yang dibuat dalam pemeriksaan saksi tersebut pada dasarnya akan dibacakan penyidik atau dibaca sendiri oleh saksi untuk memastikan hal-hal yang terdapat dalam BAP adalah memang benar seperti yang dikatakan oleh saksi. Ketika saksi telah setuju dengan hal yang terdapat dalam BAP, BAP tersebut selanjutnya ditandatangani oleh penyidik dan saksi. Tidak hanya BAP terhadap pemeriksaan saksi saja, BAP terhadap pemeriksaan tersangka juga perlu untuk ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan agar menjadi

⁵ *Ibid.*

bukti bahwa tersangka telah setuju dengan hal yang terdapat dalam BAP dan telah sesuai dengan keterangan yang diberikan tersangka.

BAP yang telah siap kemudian dapat digunakan untuk keperluan di persidangan. Dalam proses persidangan tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum sampai kepada pembacaan putusan. Salah satu tahapan yang dilakukan adalah mengenai pemeriksaan pokok perkara yang di dalamnya termasuk pemeriksaan saksi dan terdakwa. Dalam tahap pemeriksaan tersebut, saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan dimintai keterangannya atas tindak pidana yang terjadi dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa. Keterangan-keterangan saksi dan terdakwa tersebut diharapkan sesuai dengan yang telah tertulis di BAP yang dibuat oleh penyidik.

Namun adakalanya keterangan yang ada dalam BAP baik itu keterangan saksi maupun keterangan terdakwa berbeda dengan keterangan yang disampaikan di persidangan seperti pada Putusan Nomor 529 K/PID/2016. Pada putusan tersebut, keterangan yang disampaikan oleh saksi dan terdakwa pada persidangan berbeda dengan keterangan yang ada dalam BAP. Keterangan yang disampaikan oleh saksi menyatakan bahwa mereka dipukul, dilakban, dan dipaksa oleh penyidik untuk mengaku bahwa pelakunya adalah terdakwa. Begitu pula keterangan yang disampaikan terdakwa menyatakan bahwa ia juga dipukul dan dipaksa untuk mengakui perbuatannya yang menyebabkan ia menarik keterangan dalam BAP penyidik. Sedangkan, keterangan yang tertulis di dalam BAP berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi dan terdakwa. Dalam BAP tertulis bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan

pemeriksaan terhadap saksi dan terdakwa dilakukan tanpa adanya tekanan dan paksaan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa hal yang melatarbelakangi perbedaan keterangan dalam BAP dan dalam persidangan, misalnya adanya unsur ancaman, paksaan, atau bahkan hingga terjadi unsur kekerasan dari pihak penyidik saat melakukan pemeriksaan, ataupun karena tindakan yang semena-mena pada waktu penyidikan yang menyebabkan dalam memberikan pernyataan, terdakwa dan/atau saksi tidak bebas atau merasa tertekan, yang mana dengan adanya hal-hal tersebut justru menyebabkan penyidikan yang mulanya dilakukan dalam rangka untuk menggali keterangan terhadap tindak pidana yang terjadi menjadi kurang jelas. Untuk mengatasi ketidaksinambungan antara keterangan pada saat pemeriksaan di persidangan dengan keterangan yang ada dalam BAP, atas inisiatif hakim atau jaksa penuntut umum menghadirkan saksi verbalisan.

Saksi verbalisan atau disebut dengan saksi dari pihak penyidik adalah seorang penyidik yang menjadi saksi atas suatu perkara tindak pidana karena terdapat perbedaan keterangan yang disampaikan oleh saksi dan/atau terdakwa dalam persidangan dengan yang ada dalam BAP. Pada dasarnya, ketentuan tentang saksi verbalisan ini belum diatur dalam (KUHP) ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun dimunculkannya saksi verbalisan ini dilatarbelakangi dari Pasal 163 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”

Dalam ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa dimunculkannya saksi verbalisan tidak didasari pada hukum yang benar-benar menuliskan bahwa saksi verbalisan dapat dimunculkan di persidangan. Ketentuan KUHAP hanya menyebutkan tentang hakim yang dapat meminta keterangan terkait perbedaan antara keterangan yang ada dalam persidangan dengan yang ada dalam BAP. Hal ini tentu menyebabkan ketidakjelasan norma karena tidak menyebutkan secara eksplisit adanya saksi verbalisan yang dapat dimunculkan dalam persidangan terkait perbedaan yang ada.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia terutama dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, saksi verbalisan telah banyak dihadirkan dan digunakan sebagai solusi atas perbedaan keterangan saksi dan/atau terdakwa dalam BAP dan dalam persidangan. Salah satu bukti bahwa saksi verbalisan dihadirkan dalam persidangan yaitu pada Putusan No. 529 K/PID/2016 yang menghadirkan 3 (tiga) saksi verbalisan, 2 (dua) diantaranya adalah penyidik kepolisian dan 1 (satu) adalah PPNS. Keterangan-keterangan yang disampaikan saksi verbalisan tersebut diikutsertakan dalam pertimbangan hakim untuk keperluan pengambilan putusan. Namun, permasalahan timbul terkait dengan nilai pembuktian dari keterangan yang disampaikan oleh saksi verbalisan, apakah mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti atau hanya sebagai faktor penambah keyakinan hakim.

Alat bukti yang sah telah diatur di dalam pasal 184 KUHAP yang salah satunya adalah alat bukti keterangan saksi. Keterangan saksi mengenai suatu tindak pidana mempunyai kekuatan pembuktian apabila keterangan saksi tersebut merupakan keterangan yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri, dan ia

lihat sendiri.⁶ Dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, ketentuan dalam KUHAP mengenai keterangan saksi yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dimaknai “sebagai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Jadi berdasarkan Putusan MK tersebut, keterangan saksi yang diajukan tidak selalu merupakan keterangan yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri sepanjang keterangan tersebut masih relevan dengan tindak pidana yang terjadi.

Seperti yang diketahui bahwa saksi verbalisan merupakan saksi penyidik yang mana keterangannya bukanlah keterangan yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri, melainkan keterangan yang diperoleh dari hasil penyidikan. Walaupun demikian, keterangan yang disampaikan oleh saksi verbalisan tersebut belum tentu dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 karena dalam putusan tersebut menghendaki adanya korelevansian dari keterangan saksi yang tidak selalu didengar, dilihat dan dialaminya sendiri dengan tindak pidana yang terjadi.

Seorang penyidik baik itu dari anggota kepolisian ataupun dari PPNS tentu memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya sebagai penyidik sesuai dengan SOP masing-masing. Profesionalitas disini sangat dibutuhkan demi berjalannya proses pemeriksaan dari awal hingga akhir,⁷ termasuk

⁶ Pasal 1 angka 27 KUHAP

⁷ Pasal 7 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan:

Setiap Anggota Polri wajib:

profesionalitas dalam hal dimunculkannya penyidik sebagai saksi verbalisan. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian NRI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik KepolisianiNegara Republik Indonesia salah satunya, yaitu pada Pasal 14 huruf m yang menyatakan bahwa:

“Setiap penyidik anggota kepolisian dilarang untuk menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan”

Dengan adanya ketentuan tersebut, apabila penyidik yang telah melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka tersebut dimunculkan dan dijadikan saksi dalam persidangan, tentu menimbulkan pertanyaan apakah penyidik tersebut tepat untuk dimunculkan sebagai saksi dalam persidangan. Penyidik akan membenarkan hasil penyidikan yang telah ditulis olehnya dalam BAP karena hal tersebut berkaitan dengan profesionalitasnya sebagai penyidik polisi dan tentu juga membawa nama instansinya. Hal inilah yang dapat memicu timbulnya konflik kepentingan. Padahal seseorang yang dibutuhkan sebagai saksi adalah keterangan yang benar-benar diberikan oleh seseorang secara netral, bebas, objektif, dan jujur.⁸ Adapun kuasa hukum yang mana merupakan mantan Dirut PLN Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra (Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia), mengatakan bahwa seorang penyidik dirasa tidak tepat jika dihadirkan sebagai saksi fakta dengan alasan bahwa ia akan membenarkan hasil penyidikannya.⁹ Namun, tentu dalam melakukan penyidikan, penyidik dilarang melakukan

-
- b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri
 - c. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural

⁸ Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP

⁹ Rakmatulloh, *Yusril: Tidak Patut Penyidik Dihadirkan sebagai Saksi*, <https://nasional.sindonews.com/read/1028162/13/yusril-tidak-patut-penyidik-dihadirkan-sebagai-saksi-1438354535>, diakses 13 November 2017 pukul 10.10

tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara menekan dan memaksa untuk mendapat pengakuan, merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan, dan sebagainya.¹⁰

Berdasarkan permasalahan hukum di atas, pembahasan penelitian ini akan menjelaskan mengenai legalitas atau keabsahan dari dimunculkannya saksi verbalisan atas perbedaan keterangan saksi dan/atau terdakwa dalam persidangan dengan keterangan yang ada dalam BAP, apakah sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dan juga mengenai nilai pembuktian dari keterangan saksi verbalisan tersebut. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mencoba mengangkatnya dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah dengan judul: **“LEGALITAS SAKSI VERBALISAN DALAM PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”**.

Originalitas Penelitian

Tahun Penelitian	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
	Peneliti dan			
	Asal Instansi			

¹⁰ Pasal 14 Perkap Nomor 14 Tahun 2011

2016	Wieke Septiana Dewi (Universitas Brawijaya)	Kedudukan	1. Bagaimana kedudukan alat bukti keterangan saksi verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaa n Di Pengadilan (Kajian Terhadap Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang adalah penelitian terdahulu lebih mengkaji tentang kedudukan saksi verbalisan dalam alat-alat bukti yang telah diatur dan pengaruhnya terhadap putusan hakim. Sedangkan penelitian
		Saksi	saksi	
		Verbalisan	verbalisan	
		Sebagai	di	
		Alat Bukti	pengadilan	
		Dalam	berdasarka	
		Pemeriksaa	n hukum	
		n Di	acara	
		Pengadilan	pidana di	
		(Kajian	Indonesia	
		Terhadap	2. Bagaimana	
		Pasal 184	alat bukti	
		Kitab	keterangan	
		Undang-	saksi	
		Undang	verbalisan	
Hukum	digunakan			
Acara	dalam			
Pidana)	tahap			
	pembuktia			
	n pada			
	persidanga			

			n	yang akan
			pengadilan	datang lebih
			dan	mengkaji
			pengaruhn	tentang
			ya	legalitas
			terhadap	pengajuan
			putusan	saksi
			hakim	verbalisan
				dalam
				pemeriksaan
				di persidangan
				dan mengenai
				nilai
				pembuktianny
				a

Tabel 1.1

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pemanggilan saksi verbalisan dalam pemeriksaan di persidangan sudah sesuai dengan hukum acara pidana?
2. Apakah keterangan saksi verbalisan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pemanggilan saksi verbalisan sudah sesuai atau belum dengan hukum acara pidana
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisan sebagai alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya ilmu hukum dan hukum acara pidana pada khususnya, terutama mengenai legalitas atau keabsahan diajukannya saksi verbalisan sudah sesuai atau belum dengan hukum acara pidana dan nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi verbalisan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual dan informasi bagi mahasiswa tentang legalitas atau keabsahan diajukannya saksi verbalisan sudah sesuai atau belum dengan

hukum acara pidana dan nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi verbalisan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk memperjelas ketentuan mengenai saksi verbalisan dan dapat dijadikan sebagai informasi bagi aparat penegak hukum ketika akan mengajukan saksi verbalisan dalam pemeriksaan di pengadilan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak informasi terkait pemeriksaan dalam persidangan

E. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab menguraikan tentang pokok-pokok bahasan materi yang dikaji serta akan diperjelas lagi dalam beberapa sub bab. Sistematika dalam penulisan ini meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab yang terdiri dari beberapa sub antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dalam penelitian ini.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Merupakan bab yang memuat uraian mendalam tentang teori-teori yang mendasari penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan

judul. Teori-teori tersebut didapat dari studi kepustakaan beberapa literatur.

BAB III: METODE PENELITIAN

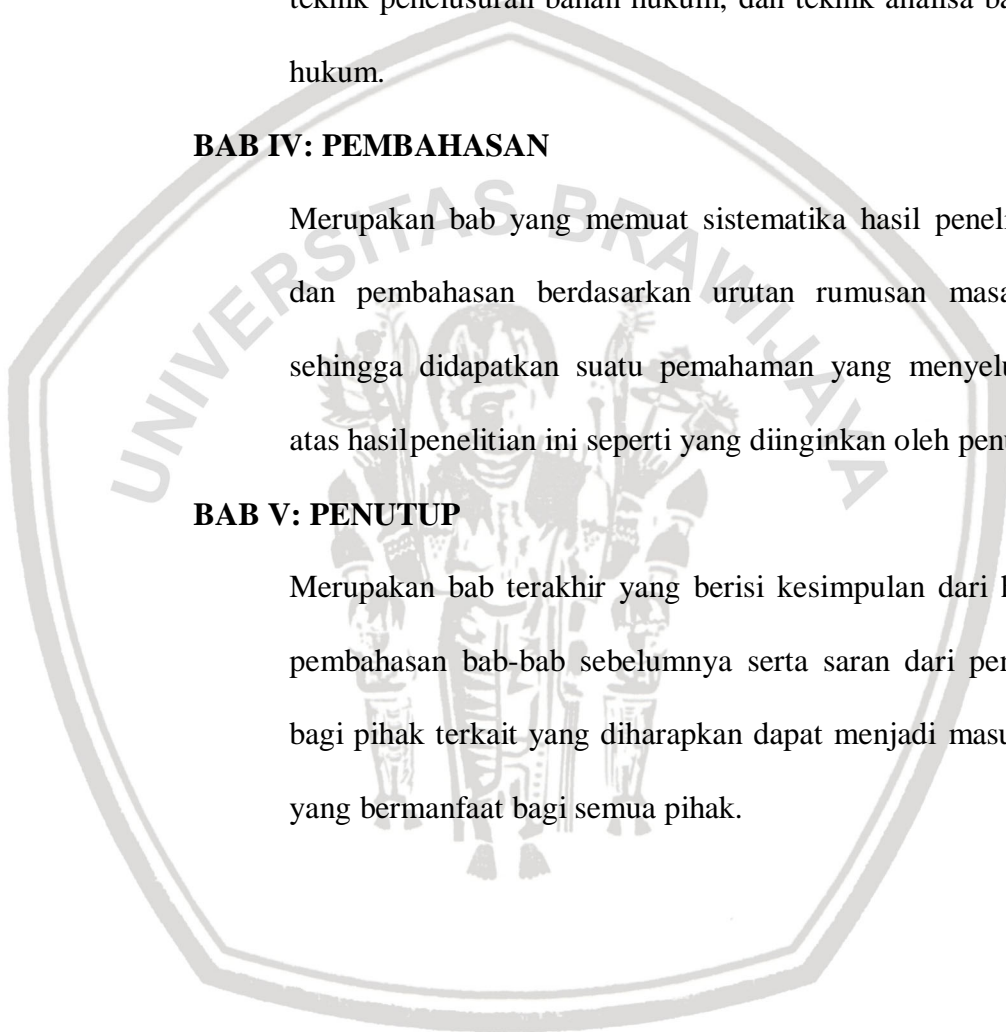
Merupakan bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, dan teknik analisa bahan hukum.

BAB IV: PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memuat sistematika hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan urutan rumusan masalah, sehingga didapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh atas hasil penelitian ini seperti yang diinginkan oleh penulis.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis bagi pihak terkait yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Kata pembuktian bermula dari kata “bukti” yang artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”. Kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian memiliki arti yaitu suatu proses perbuatan atau cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Demikian pula mengenai pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an” yang artinya memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti.¹¹ Menurut Darwan Prints, pembuktian merupakan perbuatan yang membuktikan bahwa benar adanya suatu peristiwa pidana sudah terjadi dan terdakwa yang melakukannya dan divonis bersalah berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan, menyebabkan ia harus mempertanggungjawabkannya.¹² Sedangkan pembuktian menurut pemahaman umum adalah untuk menunjukkan tentang suatu keadaan yang mana bersesuaian dengan suatu pokok persoalan, atau untuk

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 549

¹² Darwan Prinst, **Hukum Acara Pidana Dalam Praktik**, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 133

mencari kesesuaian antara pokok peristiwa dengan akar-akar peristiwanya.¹³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat tentang jenis-jenis atau macam-macam alat bukti yang menurut hukum sah, yang mana hal tersebut tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Meskipun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, namun beberapa ahli hukumlah yang berusaha untuk menjelaskan tentang arti dari pembuktian tersebut.¹⁴

Proses pembuktian atau membuktikan memiliki maksud dan usaha untuk memberikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat diterima akal sehat terhadap kebenaran dari peristiwa tersebut.¹⁵ Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman mengenai cara-cara yang telah dibenarkan oleh undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁶

2. Tujuan Pembuktian

Hal yang dimaksud dengan membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan

¹³ Hartono, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 59

¹⁴ Subekti, **Hukum Pembuktian**, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm. 1.

¹⁵ Andi Sofyan, **Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 230

¹⁶ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 273.

yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sesuai dengan yang didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHP, bahwa hal yang secara umum telah diketahui tidak perlu dibuktikan. Oleh sebab itu, hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha membuktikan:

- a. Mengenai benar tidaknya suatu peristiwa tersebut telah terjadi
- b. Mengenai benar tidaknya suatu peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana
- c. Mengenai sebab-sebab peristiwa itu terjadi
- d. Mengenai siapa orang yang telah bersalah dalam peristiwa yang telah terjadi tersebut

Maka tujuan pembuktian di atas adalah untuk mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara tersebut, dan bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang.

3. Sistem atau Teori Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan juga sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya mengenai suatu hal yang dibuktikan.¹⁷ Pengertian dari sistem pembuktian yang di dalamnya mengandung isi demikian, dapat

¹⁷ Adami Chazawi, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 17

pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian. Ada beberapa sistem pembuktian yang dikenal dalam hukum acara pidana yaitu:

- a. Sistem Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction In Time*)

Sistem ini memberikan pengertian bahwa hakim dapat memberikan pernyataan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan berdasarkan pada keyakinan saja dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) diperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta mengenai caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut. Tidak perlu dipertimbangkan pula mengenai apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis atau tidak. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung pada hati nurani hakim.

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar yang mana selayaknya manusia biasa, hakim dapat melakukan kesalahan terhadap keyakinan yang telah dibentuknya, dikarenakan tidak ada kriteria mengenai alat-alat bukti tertentu yang harus digunakan serta syarat dan cara bagaimana hakim dalam membentuk keyakinannya tersebut. Selain itu pada sistem ini terbuka peluang yang cukup besar untuk terjadinya praktik yang sewenang-wenang dalam menegakkan hukum dengan bertumpu pada alasan hakim yang telah yakin.¹⁸

¹⁸ Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 26

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan dengan Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem ini sedikit lebih maju daripada sistem yang pertama walaupun kedua sistem ini dalam hal menaik hasil pembuktian tetap didasarkan kepada keyakinan hakim. Dikatakan lebih maju karena dalam sistem ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim guna membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, didasarkan pada alasan-alasan yang logis dan masuk akal. Dengan sistem ini, walaupun UU memberi penjelasan mengenai alat-alat bukti, tetapi untuk menggunakannya dan untuk memberikan kekuatan pembuktian pada alat-alat bukti tersebut, tetap diserahkan pada pertimbangan hakim dengan alasan-alasan yang logis. Artinya alasan yang dipergunakan untuk membentuk keyakinan hakim harus masuk akal atau dapat diterima oleh akal sehat dan tidak mengada-ada. Sistem ini kadang disebut juga dengan sistem pembuktian keyakinan hakim bebas karena dalam membentuk keyakinannya hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebukan alasan-alasan dari keyakinan yang didapatnya dari alat-alat bukti tersebut.¹⁹

- c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positive Wettwlijkstheode*)

¹⁹ Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 18

Maksudnya dari sistem ini adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat bukti serta cara-cara mempergunakannya telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan yang ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang, baik mengenai alat buktinya maupun cara-cara menggunakannya, maka hakim diwajibkan untuk harus segera menarik kesimpulan bahwa terdakwa telah bersalah atas tindak pidana yang terjadi. Keyakinan hakim tersebut sama sekali dianggap tidak penting dan bukan merupakan bahan yang boleh dijadikan pertimbangan guna mengambil kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Jadi sistem ini adalah sistem yang mana berlawanan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan saja.²⁰

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Terbatas atau Negatif (*negativewettelijk*)

Dalam hal untuk membuktikan kesalahan terdakwa menurut sistem ini, hakim tidak seluruhnya mengandalkan alat-alat bukti dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, melainkan harus disertai pula dengan keyakinan bahwa terdakwa memang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Keyakinan tersebut harus didasarkan pada fakta-fakta yang ada dari alat bukti yang telah diatur dan ditentukan oleh peraturan. Jadi dapat

²⁰ *Ibid*, hlm. 19

dikatakan bahwa untuk menarik kesimpulan mengenai pembuktian didasarkan pada 2 hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.

Sistem ini disebut dengan sistem berdasarkan UU, karena dalam membuktikannya harus berdasarkan ketentuan yang ada pada UU baik mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan maupun mengenai bagaimana cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi guna menyatakan tentang terbuktinya terdakwa telah melakukan tindak pidana. Disebut dengan terbatas, dikarenakan dalam melakukan pembuktian untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah sudah melakukan tindak pidana disamping menggunakan alat-alat bukti menurut UU juga dibatasi atau diperlukan adanya keyakinan hakim. Artinya bila tidak ada keyakinan hakim, maka hakim tidak boleh menyatakan sesuatu yang akan dibuktikan sebagai terbukti, meskipun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti.²¹

B. Tinjauan Umum Mengenai Saksi

1. Pengertian Saksi dan Keterangan Saksi

Saksi merupakan orang yang memberikan pernyataan dalam suatu dokumen yang kemudian dapat digunakan sebagai alat bukti atau memiliki arti lain bahwa saksi merupakan seseorang yang memberikan

²¹ *Ibid*, hlm. 20

keterangan mengenai suatu peristiwa berdasarkan kesaksiannya sendiri tentang fakta yang ia alami sendiri, ia lihat sendiri, atau ia dengar sendiri.²² Mengenai saksi yang mendengar atau melihat sendiri secara langsung, hampir dipastikan bahwa saksi tersebut hanya terbatas pada mendengar atau melihat suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana. Sedangkan saksi mengalami sendiri secara langsung, dapat dikatakan bahwa saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai korban atas dugaan peristiwa pidana yang terjadi atau saksi tersebut memiliki kaitan atau berhubungan dengan peristiwa tersebut.²³

Mengenai batasan keterangan saksi, secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menuliskan, bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkarapidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP tersebut, dapat diketahui unsur-unsur penting yang ada dari keterangan saksi, yaitu keterangan dari saksi, mengenai suatu peristiwa pidana, yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri.²⁴

2. Syarat Sahn Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi ialah bukti yang paling utama dalam perkara pidana dan hampir semua pembuktian dalam perkara pidana selalu bersandar atau didasarkan pada pemeriksaan keterangan saksi.

²² Jimly Ashiddiqie, **Hukum Acara Pengujian Undang-Undang**, SinarGrafika, Jakarta, 2010, hlm. 153

²³ Hartono, *op.cit*, hlm. 51

²⁴ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm 287

Selain pembuktian dengan alat bukti yang lain yang telah diatur oleh UU, masih selalu diperlukan dan digunakan pembuktian dengan menggunakan alat bukti dari keterangan seorang saksi. Agar suatu keterangan yang disampaikan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang menurut UU telah sah, perlu diperhatikan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, agar keterangan dari seorang saksi dapat dianggap sah untuk dinyatakan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, yang mana harus dipenuhi ketentuan sebagai berikut:²⁵

a. Wajib mengucapkan sumpah atau janji

Pasal 160 ayat (3) KUHAP mewajibkan pada setiap saksi sebelum memberikan keterangannya untuk terlebih dulu mengucapkan sumpah menurut masing-masing agamanya yang isinya berupa sumpah atau janji bahwa dirinya akan memberikan keterangan yang sesungguhnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Kepercayaan atas kebenaran isi keterangan yang diletakkan di atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah, didasarkan pada 2 (dua) alasan yang bersifat menekan secara psikologis orang, yaitu:²⁶

- 1) Pada kepercayaan terhadap sanksi dosa dan kutukan dari Tuhan kepada orang yang dengan sengaja melanggar sumpah, sesuai dengan agama yang dianut. Dengan alasan ini maka sumpah yang diucapkan saksi haruslah berdasarkan cara agama masing-masing dan tidak boleh menciptakan

²⁵ *Ibid*, hlm 286

²⁶ Adami Chazawi, *op.cit*, hlm 33

cara sendiri di luar yang ditentukan oleh agama masing-masing.

- 2) Pada sanksi hukum pidana, telah menentukan sanksi pidana maksimum 7 sampai 9 tahun penjara bagi orang yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah.²⁷

b. Keterangan saksi bernilai sebagai bukti

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 juncto Pasal 185 ayat (1) KUHP menentukan bahwa:²⁸

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.”

c. Keterangan saksi harus disampaikan di sidang pengadilan

Alat bukti keterangan saksi adalah mengenai suatu hal yang saksi berikan di sidang pengadilan yang bertitik berat sebagai alat bukti ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian. Jika dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 27 KUHP, hal-hal yang harus dijelaskan dalam persidangan di pengadilan adalah mengenai suatu hal yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri, atau alami sendiri dengan menyebutkan alasannya. Dengan demikian, keterangan yang dinyatakan tidak di depan sidang pengadilan (*outside the court*)

²⁷ Pasal 242 KUHP

²⁸ *Ibid*, hlm. 287

bukanlah alat bukti, tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.²⁹

d. Satu saksi bukan saksi

Di dalam KUHAP menganut asas *unnus testis nullus testis* yang memiliki arti bahwa satu saksi bukan merupakan saksi. Apabila ingin membuktikan kesalahan terdakwa haruslah dipenuhi paling sedikit atau minimal dengan dua alat bukti. Hal ini dapat diartikan apabila alat bukti yang diajukan penuntut umum hanya seorang saksi saja dan tanpa ditambah dengan saksi yang lain bukti yang lain, maka kesaksian yang hanya seorang tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang cukup guna membuktikan kesalahan terdakwa dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

C. Tinjauan Umum Mengenai Saksi Verbalisan

1. Pengertian Saksi Verbalisan

Kata verbalisan berasal dari kata verbal yang memiliki makna yaitu secara lisan atau bersifat khayalan. Verbalisan Orang (penyidik) adalah pihak yang melaksanakan proses verbal (penyidikan).³⁰ Sedangkan saksi verbalisan yakni saksi dari pihak penyidik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ataupun majelis hakim, di mana saksi tersebut bersangkutan dengan perkara.

²⁹ *Ibid*, hlm. 287-288

³⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1260

Kata verbalisan merupakan istilah yang lazim berkembang dalam praktek serta oleh KUHAP tidak diatur. Menurut makna secara doktrina, verbalisan ialah istilah yang diberikan kepada petugas untuk membuat, mengarang, atau menyusun berita acara. Dengan demikian, apabila dilihat dari visi praktik peradilan, eksistensi atau keberadaan saksi verbalisan akan tampak jika dalam persidangan terdakwa menyangkal kebenaran keterangan yang dikemukakan saksi dan kemudian saksi atau terdakwa di sidang pengadilan berbeda atau tidak sama dengan keterangannya diberikan dalam berita acarayang dibuat oleh penyidik.³¹

2. Keterangan Saksi Penyidik (Verbalisan)

Pada dasarnya keterangan yang diberikan saksi di sidang pengadilan, sejalan dengan keterangan yang telah diberikannya pada berita acara penyidikan. Namun, dengan adanya prinsip ini tidak serta merta dapat mengurangi kebebasan saksi untuk memberi keterangan yang berbeda antara keterangan yang disampaikan di sidang pengadilan dengan keterangan yang diberikan pada pemeriksaan penyidikan. Kebebasan dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti dari keterangan yang telah diberikannya pada saat pemeriksaan penyidikan. Bahkan apabila keterangannya disampaikan di sidang pengadilan bertentangan dan/atau berbeda dengan apa yang diterangkan dalam berita acara penyidikan,

³¹ I Dewa GD. Saputra Valentino Pujana, **Jaminan Kekebalan Hukum Bagi Saksi Pelaku/Justice Collaborator**, 2013, E-journal (online), <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2453>, diakses 13 November 2017, pukul 10.14

hakim wajib meminta penjelasan disertai alasan saksi mengenai perbedaan tersebut.³²

Mengenai makna bebas dalam hal memberi keterangan di persidangan, ditujukan kepada sikap dan keadaan psikis maupun fisik saksi, yaitu:³³

- a. Tidak ada pengaruh dan paksaan maupun tekanan dari siapa saja
- b. Pertanyaan yang diajukan harus dilakukan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, agar jawaban yang diberikan merupakan jawaban yang benar-benar keluar dari kesadaran hati nuraninya sesuai dengan kecerdasannya.
- c. Larangan untuk mengajukan pertanyaan yang memojokkan ataupun menjerat kepada saksi, yakni keterangan yang tidak pernah diberikan oleh saksi, tetapi oleh hakim atau JPU dianggap seolah-olah pernah diberikan saksi. Pertanyaan yang menjerat seperti ini tentu melanggar kebebasan saksi dalam memberikan keterangannya.

Saksi diperbolehkan untuk memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan yang terdapat pada berita acara penyidikan dengan disertai alasan yang dapat diterima secara logis. Perbedaan kedua keterangan itu, harus disertai dengan alasan yang mampu memperlihatkan kebenaran perbedaan tersebut.³⁴

³² M. Yahya Harahap, *loc.cit.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid*, hlm. 185

D. Tinjauan Umum Mengenai Sistem Peradilan Pidana

Pemahaman tentang sistem peradilan pidana dapat dilihat dari elemen kata yang melekat dalam sistem peradilan pidana tersebut. Sistem, berarti susunan atau jaringan yang mana pada sistem tersebut terdapat beberapa komponen yang kemudian menyatu membentuk suatu sistem. Menurut Samodra Wibawa, sistem merupakan hubungan antara beberapa unsur dimana unsur yang satu tergantung kepada unsur yang lain. Bila salah satu unsur hilang, maka sistem tidak dapat berjalan.³⁵

Peradilan pidana berasal dari kata adil, yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, ataupun keseimbangan. Secara keseluruhan peradilan yaitu menunjukkan suatu proses yang mana proses tersebut dilakukan untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan. Dalam ilmu hukum pidana (*criminal scientific by law*), pidana dapat diartikan sebagai sanksi, hukuman atau penderitaan yang diberikan, yang mana hal tersebut dapat mengganggu keberadaan psikis maupun fisik dari orang yang dikenakan pidana.

1. Pengertian dan Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia ini sebenarnya merupakan terjemahan dari *criminal justice system*, suatu sistem yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum (*law enforcement officer*) di Amerika Serikat. Istilah sistem peradilan pidana secara otomatis mengharapkan sistem tersebut bekerja seara berkaitan satu dengan yang lain, saling berhubungan dalam satu tujuan bersama. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana (SPP) dengan sendirinya

³⁵ Tolib Effendi, **Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan di Beberapa Negara**, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 11

disebut sebagai *Integrated Criminal Justice System*. Pendekatan sistem peradilan pidana memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat).
- b. Pengawasan penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana
- c. Efektivitas sistem dalam menanggulangi kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif, dan integrative agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.³⁶ Usaha untuk mengurangi atau menyempitkan gambaran pada masyarakat, bahwa sistem peradilan pidana tidak atau kurang berfungsi, yaitu dengan meningkatkan efektivitas setiap dan masing-masing subsistem serta bekerja lebih terpadu untuk memperoleh efisiensi bersama (keseluruhan sistem) yang lebih tinggi.³⁷

Sistem peradilan pidana diartikan secara lebih jelas oleh Mardjono Reksodiputro sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan

³⁶ *Ibid*, hlm. 21

³⁷ *Ibid*, hlm. 23-24

pemasyarakatan terpidana.³⁸ Sementara itu, menurut Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum.³⁹

Tujuan utama sistem peradilan pidana yaitu menanggulangi masalah kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, keempat subsistem (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang terdapat di dalamnya secara administratif merupakan lembaga penegak hukum yang masing-masing bersifat mandiri. Tujuan menyeluruh sistem peradilan pidana, dapat dibagi atas jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.⁴⁰ Resosialisasi pelaku tindak pidana justru merupakan tujuan jangka pendek dari sistem peradilan pidana. Adapun tujuan jangka menengah yaitu pencegahan kejahatan dan tujuan jangka panjang yaitu kesejahteraan sosial.

2. Komponen Sistem Peradilan Pidana

Komponen sistem peradilan pidana yang umum diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan penasihat hukum. Antonius Sujata mengatakan bahwa pada umumnya komponen sistem peradilan pidana mencakup:

- a. Penyidik (kepolisian/penyidik pegawai negeri sipil)

³⁸ Mardjono Reksodiputro, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Kumpulan Tulisan UI, Jakarta, 1993, hlm. 1

³⁹ Barda Nawawi, **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara**, Citra Kencana, Semarang, 1994, hlm. 197

⁴⁰ Mardjono Reksodipuro, *op.cit*, hlm 140

- b. Kejaksaan (penuntut umum)
- c. Penasihat hukum (korban/pelaku)
- d. Pengadilan (hakim)
- e. Pihak lain (saksi ahli/pemehati).⁴¹

Diundangkannya Undang–Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan SPP Indonesia, menyebabkan landasan bagi proses penyelesaian suatu perkara pidana di Indonesia sudah dicabut. Komponen SPP yang biasanya diakui, baik dalam praktik penegakan hukum maupun dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*), terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁴²

Komponen sistem peradilan pidana sebagaimana yang telah diuraikan, pada dasarnya hampir sama dan saling melengkapi. Oleh karena itu, komponen sistem peradilan pidana meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut.

a. Kepolisian

1) Pengertian

Kepolisian adalah salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana yang menentukan keberhasilan dan keseluruhan sistem dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan sub

⁴¹ Antonius Sujata, **Reformasi Penegakan Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 8

⁴² *Ibid*, hlm. 24

sistem yang langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab dari kepolisian dapat dikatakan cukup besar daripada subsistem lainnya.

Kepolisian yang merupakan salah satu dari sekian banyaknya aparat penegak hukum, memperoleh kewenangannya berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi. Kepolisian Negara memiliki pengertian berdasarkan Pasal 1 angka 1, yakni:

“Segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

2) Wewenang

Tugas dan wewenang dari kepolisian telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, salah satunya melaksanakan penyidikan dan penyelidikan atas semua tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku dan ketentuan lainnya.⁴³

Pengertian mengenai penyelidikan teruat dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP jo. Pasal 1 angka 8 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI:

“Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”.

⁴³ Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pengertian dari penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5

KUHAP adalah:

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.”

Sedangkan pengertian penyidik dimuat dalam Pasal

1 angka 1 KUHAP juncto Pasal 1 angka 10 UU Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Selanjutnya disebut pula dalam Pasal 6 KUHAP:

(1) “Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”

Dari beberapa pengertian diatas disebutkan bahwa penyidik bukan hanya dari pihak Kepolisian namun juga pegawai negeri sipil yang telah diberikan wewenang oleh undang-undang sehingga dapat melakukan penyidikan yang biasa disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pengertian PPNS disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 UU No.

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI bahwa:

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup

undnag-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing.”

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 3 KUHAP adalah:

“serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan butki itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Wewenang penyidik menurut Pasal 7 KUHAP adalah:

- a. “menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Wewenang Polri dibidang proses pidana menurut Pasal 16

ayat (1) UU Kepolisian adalah:

- (1) “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan kewenangan PPNS sebagai berikut:

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.”

Berdasarkan pasal tersebut, wewenang yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sama wewenang yang dimiliki oleh penyidik Kepolisian kecuali dalam hal penahanan.

b. Kejaksaan

1) Pengertian

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan. Sebagai badan yang memiliki dalam penegakan hukum dan juga keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang mana dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Presiden.⁴⁴

2) Wewenang

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan:

- (1) “Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”

Disebutkan dalam Pasal 14 KUHAP bahwa kewenangan

JPU adalah sebagai berikut:

- “Penuntut umum mempunyai wewenang:
- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;

⁴⁴ Kejaksaan, diakses dari http://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1 pada 13 November 2017 pukul 10.05

- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.”

c. Pengadilan

1) Pengertian

Pengadilan merupakan instansi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan juga memutus perkara. Lembaga pengadilan adalah salah satu lembaga yang juga sangat penting sebab pada lembaga ini dilaksanakan suatu putusan terhadap suatu perkara.

Sedangkan peradilan merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh lembaga pengadilan dalam melaksanakan tugasnya dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau dengan cara menemukan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum pada hal-hal yang telah nyata yang mana

hal tersebut dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) guna menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materiil, dengan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.

2) Wewenang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menjelaskan tentang kedudukan peradilan umum dalam pasal 2 dan 3 berbunyi:

“Pasal 2
Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Pasal 3

(1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Negeri;
- b. Pengadilan Tinggi.”

Pengadilan Negeri (PN) adalah lembaga peradilan di lingkup peradilan umum yang berada di tingkat ibu kota kabupaten atau kota. Tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri sendiri diatur secara khusus dalam UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada Pasal 50.

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”

Pengadilan Tinggi (PT) merupakan lembaga peradilan yang berada pada lingkup peradilan umum yang mengadili perkara pada tingkat banding dan berada di tingkat ibu kota provinsi.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga terakhir yang berperan dalam prosesi peradilan pidana. Menjadi tahapan akhir dari proses peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan memiliki harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu berusaha agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana yang sudah pernah dilakukannya.

E. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formal dalam bahasa Belanda, disebut dengan “*Strafvordering*”, dan dalam bahasa Inggris disebut “*Criminal Procedure Law*”. Sedangkan dalam bahasa Perancis disebut dengan “*Code d’instruction Criminelle*” dan di Amerika Serikat disebut dengan “*Criminal Procedure Rules*”⁴⁵. Hukum acara pidana tersebut tentu dibedakan dengan hukum pidana materiil atau hukum pidana yang berisi tentang petunjuk maupun penjelasan tentang delik, peraturan tentang petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, serta aturan tentang pemidanaan yang mengatur siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.

Dalam KUHAP tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana tersebut, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana seperti

⁴⁵ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi**, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 2

pengertian penyelidikan/penyidikan, penuntutan, mengadili, pra peradilan, putusan pengadilan, dan sebagainya. Menurut R Soesilo⁴⁶ bahwa pengertian hukum acara pidana atau disebut juga hukum pidana formil adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai:

- a. Cara bagaimana harus mengambil tindakan-tindakan apabila terdapat sangkaan bahwa telah terjadi tindak pidana dan cara bagaimana mencari kebenaran tentang tindak pidana yang telah dilakukan.
- b. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, melakukan pemeriksaan, pengeledahan, dan penyitaan untuk membuktikan kesalahan terdakwa
- c. Cara bagaimana pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa dilakukan oleh hakim hingga dijatuhkan putusan

Secara singkat dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Selain pendapat yang dikemukakan oleh R. Soesilo, mengenai pengertian dari hukum acara pidana juga dikemukakan oleh Van Bemmelem dengan menggunakan istilah ilmu dalam hukum acara

⁴⁶ R. Soesilo, **Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)**, Cetakan Ketiga, Politeia, Bogor, 2005, hlm. 3

pidana yaitu mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran peraturan pidana:⁴⁷

- a. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran
- b. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan tersebut
- c. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menangkap pelaku
- d. Mengumpulkan barang-barang bukti yang telah diperoleh dari hasil penyidikan guna dilimpahkan kepada hakim
- e. Hakim memberi keputusan tentang terbukti atau tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terakwa serta menjatuhkan pidana kepadanya
- f. Menentukan upaya hukum selanjutnya untuk melawan atau menyangkal putusan tersebut
- g. Melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan tersebut⁴⁸

Sedangkan menurut R. Abdoel Djamali hukum acara pidana atau yang bisa disebut juga dengan hukum pidana formal mengatur mengenai cara pemerintah untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil.⁴⁹

2. Tujuan Acara Pidana

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, mengenai tujuan dari hukum acara pidana telah dirumuskan yakni:

“Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan

⁴⁷ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 7

⁴⁸ Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 102

⁴⁹ Abdoel Djamali, **Pengantar Hukum Indonesia**, PT. Raja Grafindo Presda, Jakarta, 2010, hlm.199

tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Jika didasarkan pada rumusan tersebut, maka dapat diuraikan mengenai tujuan dari hukum acara pidana sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan kebenaran atau setidaknya mendekati kebenaran materil yang memiliki arti yaitu untuk mendapatkan kebenaran yang paling lengkap dari suatu perkara pidana dengan melaksanakan ketentuan dalam hukum acara pidana secara tepat. Mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya melaksanakan pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan oleh pelaku dan apakah pelaku tersebut dapat dipersalahkan
- b. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan guna mencapai suatu tujuan, akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud.⁵⁰ Menurut Peter R. Senn,⁵¹ metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis. Sedangkan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Metode penelitian adalah hal yang penting dalam penulisan karya ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebenaran tersebut bukanlah kebenaran secara religious dan metafisis, melainkan dari segi epistemologi, yang artinya kebenaran yang dilihat dari teori atau diskursus ilmu pengetahuan. Pada dasarnya kebenaran yang harus diperoleh dari penelitian hukum ini adalah kebenaran koherensi. Dalam hal ini bukan fakta empiris yang akan diperoleh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Sehingga nantinya dari penelitian hukum ini dapat ditemukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, ataupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari

⁵⁰ Winarno Soerakhmat, **Dasar dan Teknik Research**, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 131

⁵¹ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hlm. 46

metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵²

Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini karena nilai, mutu, dan validitas dari hasil penelitian ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Terkait hal itu diperlukan suatu metode yang sistematis dan terarah guna memperoleh hasil yang sesuai dengan prosedur yang benar. Oleh karena itu, maka dalam penulisan karya ilmiah berupa laporan penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan laporan penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni tipe penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁵³ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas permasalahan pokok atau isu hukum dan konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam laporan penelitian ini.⁵⁴

⁵² Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35

⁵³ Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Malang, 2008, hlm. 295.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 32.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya. Menurut Johny Ibrahim, nilai ilmiah dari pembahasan serta pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan.⁵⁵

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai hal mengenai permasalahan yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan⁵⁶ dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum atau permasalahan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 299

⁵⁶ Peter Marzuki, *Op.cit*, hlm. 133.

seyogianya.⁵⁷ Adapun sumber bahan hukum yang dipakai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.⁵⁸ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) dan (2), Pasal 159 ayat (2), Pasal 160 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 161, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165 ayat (1) dan (2), Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 184 ayat (1), dan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81
- b. Pasal 9 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 141.

⁵⁸ *Ibid*.

- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 14 huruf c, d, dan e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010
- e. Putusan Nomor 529 K/PID/2016

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi kamus-kamus hukum, buku teks, dan jurnal-jurnal hukum sehingga dapat mendukung, membantu melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam laporan penelitian ini.

Pada penulisan laporan penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, doktrin, pendapat ahli, dan artikel tentang hukum yang diakses dari internet yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan. Kegunaan bahan hukum sekunder ini adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.⁵⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penulisan skripsi ini ialah berupa buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁵⁹ *Ibid.*

dan Kamus Bahasa Inggris selama masih relevan terhadap kajian ilmiah yang dilakukan.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Teknik penelusuran bahan hukum primer dilakukan dengan cara *library research* yaitu suatu cara memperoleh bahan hukum dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari undang-undang dalam bentuk buku atau dokumen yang dimiliki oleh penulis maupun yang diperoleh dari penelusuran internet.

2. Bahan Hukum Sekunder

Teknik penelusuran bahan hukum sekunder sama dengan teknik penelusuran yang dilakukan terhadap bahan hukum primer yaitu dengan cara melakukan *library research* yaitu melalui penelusuran buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan bahan hukum sekunder lainnya yang terdapat di perpustakaan dengan meminjam atau membaca langsung di perpustakaan tersebut, yang dibeli atau dimiliki sendiri oleh penulis, serta yang diperoleh dari penelusuran melalui internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Teknik yang digunakan dalam penelusuran bahan hukum tersier ini adalah dengan melakukan penelusuran kamus berupa KBBI dan kamus Bahasa Inggris yang dimiliki oleh penulis.

E. Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam hal ini memakai teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan penafsiran atau interpretasi berupa interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal adalah penafsiran menurut tata Bahasa sesuai dengan yang tertera atau tertulis secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Interpretasi ini digunakan untuk menafsirkan arti kata atau tata bahasanya pada ketentuan Pasal 163 KUHAP agar lebih jelas dan dimengerti mengenai maksud dari ketentuan tersebut serta ketegasan dan kepastian hukum yang terkandung di dalamnya akan lebih mudah diraih. Sedangkan interpretasi sistematis adalah penafsiran yang dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam peraturan yang sama maupun dengan peraturan yang lain. Peraturan yang saling berhubungan dengan peraturan yang lainnya yaitu pada pasal 163, Pasal 184, Pasal 185 KUHAP, Pasal 14 Perkap Nomor 14 Tahun 2011, dan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010.

F. Definisi Konseptual

1. **Legalitas** adalah perihal keabsahan mengenai suatu hal baik yang belum diatur ataupun yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Penyidik** adalah pejabat polisi NRI atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
3. **Saksi verbalisan** adalah seorang penyidik yang dijadikan sebagai saksi atas suatu perkara tindak pidana

4. **Hukum acara pidana** adalah peraturan yang dibuat dengan tujuan memberikan sebuah pedoman kepada aparat penegak hukum mengenai prosedur untuk melaksanakan hukum pidana materiil



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemanggilan Saksi Verbalisan/Penyidik dalam Pemeriksaan di Persidangan

1. Saksi yang Dapat Diperiksa Di Persidangan

Saksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁶⁰ adalah orang yang dimintai keterangan tentang suatu peristiwa dalam kepentingan pemeriksaan. Sedangkan saksi menurut kamus hukum⁶¹ adalah orang yang terlibat atau dianggap mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, kejahatan, atau suatu peristiwa. Pengertian dari saksi juga diatur didalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Berdasarkan beberapa pengertian dari saksi tersebut, terlihat bahwa saksi merupakan orang yang mengetahui sendiri tindak pidana yang terjadi yang mana keterangannya tidak diperoleh dari pihak lain atau orang ketiga (*testimonium de auditu*). Kesaksian yang berisi keterangan dari orang lain ini tidak

⁶⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 985

⁶¹ Dzulkifli Umar dan Jimmy P., **Kamus Hukum (Dictionary of Law)**, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hlm. 349

dapat digunakan sebagai alat bukti⁶². Artinya sudah demikian ketat bahwa ketentuan dalam hukum acara pidana menutup kesaksian *testimonium de auditu*. Namun dalam perkembangannya, definisi saksi seperti yang diartikan dalam Pasal 1 angka 26 juncto Pasal 1 angka 27 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP yang mengharuskan keterangan saksi diperoleh dari yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan dialami sendiri menjadi diperluas. Perluasan definisi saksi tersebut berdasarkan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011 yang secara eksplisit dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri; Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

⁶² Pasal 1 angka 26, Pasal 1 angka 27, dan Pasal 185 ayat 5 KUHAP

Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Dengan demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, definisi keterangan seorang saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi tentang peristiwa pidana yang didengarnya sendiri, ia lihat sendiri, dan juga ia alami sendiri dengan menyebut alasannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pembatasan mengenai keterangan saksi berubah sama sekali ketika Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 memperluas makna saksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan diakuinya saksi *testimonium de auditu* dalam peradilan pidana. Mahkamah Konstitusi berpendapat arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses

Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, membebankan kewajiban hukum kepada ketua sidang untuk mendengar keterangan yang diberikan

saksi. Pemeriksaan keterangan saksi dalam persidangan meliputi saksi yang telah tertulis dalam berkas pelimpahan perkara. Oleh sebab itu, setiap saksi yang telah diperiksa penyidik dan telah tertulis dalam pelimpahan berkas perkara, wajib dan harus didengar keterangannya di depan persidangan tanpa mempermasalahkan mengenai apakah saksi tersebut merupakan saksi yang meringankan atau memberatkan terdakwa.

Kewajiban ketua sidang untuk mendengar keterangan saksi tidak hanya terbatas kepada para saksi yang telah ditulis dan tercantum dalam pelimpahan berkas perkara, namun juga meliputi semua saksi yang diajukan oleh JPU maupun oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, disamping saksi-saksi yang telah tertulis dalam berkas perkara. Baik penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk mengajukan saksi tambahan diluar saksi-saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan berkas perkara. Ketua sidang dilarang untuk menolak saksi-saksi tambahan baik saksi yang diajukan oleh JPU, terdakwa atau penasihat hukum tanpa mempermasalahkan apakah saksi tambahan yang diajukan tersebut bersifat meringankan atau memberatkan terdakwa.

Batas tenggang waktu mengajukan saksi-saksi tambahan baik oleh terdakwa atau penasihat hukum maupun penuntut umum, terbatas sebelum ketua sidang menjatuhkan putusan atas perkara yang bersangkutan. Berarti undang-undang memberi hak kepada mereka untuk mengajukan saksi tambahan selama proses persidangan masih

berlangsung. Hak untuk mengajukan tertutup apabila ketua sidang telah menjatuhkan putusan, bukan setelah pemeriksaan perkara selesai.

Seperti yang telah diterangkan, secara umum undang-undang menganut prinsip bahwa menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban bagi setiap orang. Akan tetapi KUHAP sendiri memberikan beberapa pengecualian. Ada beberapa orang yang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pada dasarnya pengecualian ini dikaitkan dengan faktor hubungan kekeluargaan, jabatan, dan ketidakmampuan seseorang untuk bertindak menjadi saksi, seperti anak-anak dan orang sakit jiwa.

Jika ditinjau dari segi sifat pengecualian yang membebaskan seseorang dari kewajiban saksi, dapat dikelompokkan menjadi:

a. Mereka yang dapat mengundurkan diri

Mengenai mereka yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi diatur dalam Pasal 168 dan Pasal 169. Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya mereka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat dilakukan pengunduran diri sebagai saksi. Akan tetapi jika pelarangan yang diatur dalam Pasal 168 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 169 ayat (1), pelarangan kelompok ini untuk menjadi saksi bersifat tidak mutlak. Pada satu pihak mereka diperkenankan didengar keterangannya sebagai saksi, tetapi pada sisi lain dapat mengundurkan diri. Alasan tidak diperkenankan mereka menjadi saksi dan dapat mengundurkan diri dikaitkan dengan faktor hubungan kekeluargaan.

b. Mereka yang dapat meminta dibebaskan

Berdasarkan ketentuan Pasal 170, terdapat sekelompok orang yang dapat meminta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai seorang saksi. Mengenai hal pembebasan diri menjadi saksi, juga bersifat tidak mutlak. Pasal 170 menegaskan bahwa mereka dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Pada diri mereka tetap melekat kewajiban saksi, namun undang-undang memberi hak kepada mereka untuk mengajukan agar dibebaskan dari kewajiban tersebut dengan disertai alasan. Alasan yang dapat diajukan untuk dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi menurut Pasal 170 ayat (1) yaitu karena pekerjaan, karena harkat martabat, atau karena jabatannya yang diwajibkan menyimpan rahasia. Ketiga alasan tersebut merupakan alasan yang pada umumnya dijadikan alasan memintakan pembebasan kewajiban sebagai saksi. Namun ada kemungkinan terdapat alasan-alasan yang lain diluar ketiga alasan utama tersebut. Hakimlah yang berhak untuk mempertimbangkan sah atau tidaknya alasan yang telah diajukan oleh mereka yang meminta pembebasan dari kewajiban sebagai saksi.

- c. Mereka yang dilarang menjadi saksi tetapi dapat didengar keterangannya tanpa sumpah

Kelompok ketiga yang dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi ialah anak yang berumur kurang dari 15 tahun dan belum pernah

kawin serta orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa⁶³. Mereka mutlak dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi dan dilarang untuk memberi keterangan dengan sumpah. Meskipun demikian mereka masih dapat diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Alasan mereka dibebaskan dan dilarang untuk memberikan keterangan dengan sumpah karena mereka dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan sempurna dalam hukum pidana⁶⁴.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, oleh Alfitra⁶⁵ diuraikan bentuk-bentuk saksi diantaranya:

- a. Saksi *adecharge*, yaitu saksi yang memberikan keterangan menguatkan pihak terdakwa
- b. Saksi *acharge*, adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan menguatkan pihak jaksa atau melemahkan pihak terdakwa
- c. Saksi mahkota, adalah suatu kondisi dimana salah seorang diantara terdakwa dapat menjadi saksi kehormatan berupa perlakuan istimewa yakni tidak dituntut atas tindak pidana yang mana sebenarnya ia dapat dimaafkan atas kesalahannya
- d. Saksi relatif *enbevoegd*, adalah mereka yang tidak mampu secara nisbi/relative yang mana keterangannya dapat didengar, namun tidak sebagai saksi

⁶³ Pasal 171 KUHP

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 194

⁶⁵ Alfitra, **Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia**, Raih Asa Sukses (RAS), Jakarta, 2012, hlm. 63

- e. Saksi absolut *anbevoegd*, adalah saksi dimana hakim dilarang untuk mendengar mereka sebagai saksi
- f. Saksi *de auditu*, yaitu saksi yang tidak perlu didengar kesaksiannya karena keterangannya diperoleh dengan mendengar dari pihak ketiga
- g. Saksi verbalisan, adalah saksi dari pihak penyidik yang memeriksa perkara
- h. Saksi bersuara, adalah saksi yang ditemukan oleh hakim dan jaksa seperti surat-surat segel dan visum dari dokter
- i. Saksi diam, berupa sidik jari, darah yang menempel di dinding atau lantai, dan sperma
- j. Saksi yang berdiri sendiri

2. Proses Pemeriksaan Saksi Di Persidangan Berdasarkan KUHAP

Pada persidangan di pengadilan, pemeriksaan dilakukan dengan lebih dulu mendengar keterangan saksi, sesuai dengan makna yang tersirat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang menegaskan:

“Pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.”

Untuk menguatkan alasan yang mendahulukan pemeriksaan pendengaran keterangan saksi dari terdakwa, Pasal 160 ayat (1) huruf b tersebut dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) yang menempatkan urutan keterangan saksi sebagai alat bukti pada urutan pertama. Sedangkan urutan alat bukti berupa keterangan terdakwa ditempatkan pada urutan terakhir. Mendahulukan pendengaran saksi dalam pemeriksaan suatu perkara lebih manusiawi terhadap terdakwa. Sebab,

dengan didahulukan pendengaran keterangan saksi, terdakwa akan lebih baik dalam mendapatkan gambaran tentang peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya. Akan tetapi, prinsip ini tidak bersifat mutlak, tergantung pada keadaan dan kebijaksanaan ketua sidang.

Warga negara yang baik tentu mengetahui hak dan kewajibannya. Salah satu kewajiban yang dibebankan oleh hukum kepada setiap warga negara yaitu ikut membela kepentingan umum. Salah satu aspek pembelaan kepentingan umum, yakni ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana ketika dalam penyelesaian tersebut diperlukan keterangannya. Berdasarkan dari pemikiran di atas, menjadi dasar bagi pembuat undang-undang untuk menetapkan kesaksian sebagai kewajiban bagi setiap orang. Penegasan ini dapat ditemukan dalam rumusan penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHP, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menjadi saksi adalah kewajiban hukum,
- b. Orang yang menolak memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang pengadilan bisa dianggap sebagai penolakan terhadap kewajiban hukum yang dibebankan undang-undang kepadanya,
- c. Orang yang menolak kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang pengadilan, dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dari keterangan dan penjelasan pada Pasal 159 ayat (2), memberikan keterangan sebagai saksi terhadap pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang. Sesuatu

yang telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum, harus dipatuhi. Keingkaran atau penolakan atas kewajiban tersebut, dapat dikenakan tindak pidana. Seorang saksi yang telah dipanggil secara sah, tetapi tidak mau menghadiri panggilan tanpa alasan yang sah ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya dihadapkan ke pengadilan. Perintah menghadapkan ke pengadilan dapat dilakukan hakim apabila keingkaran panggilan itu cukup dilakukan 1 (satu) kali saja.

Sebelum ketua sidang melakukan pemeriksaan saksi, lebih dulu mengambil tindakan sebagai berikut:

- a. Meneliti mengenai apakah semua saksi yang dipanggil oleh penuntut umum telah hadir memenuhi panggilan.
- b. Kemudian ketua sidang memberi perintah kepada penuntut umum untuk mencegah para saksi saling berhubungan antara satu dengan yang lain

Larangan kepada saksi untuk tidak saling berhubungan sebelum memberi keterangan agar tidak saling mempengaruhi. Apabila keterangan yang diberikan seseorang telah bercampur dengan pengaruh dari orang lain, maka keterangannya tidak murni lagi kebebasannya. Padahal yang diharapkan dari setiap saksi adalah keterangan bebas yang benar-benar berasal dari kesadaran hati nuraninya tanpa adanya paksaan dan/atau pengaruh dari orang lain. Untuk maksud inilah, ketua sidang memberikan perintah kepada penuntut umum untuk mengawasi dan menjaga agar para saksi yang telah hadir tidak saling berhubungan antara satu sama lain sebelum memberi keterangannya di persidangan.

Pemeriksaan saksi yang telah hadir dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Saksi Dipanggil dan Diperiksa satu per satu

Asas ketentuan pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu, tidak sekaligus masuk ke dalam ruang sidang. Tidak dibenarkan diperiksa secara bersama-sama, sepanjang hal tersebut tidak diperlukan. Pemeriksaan seorang saksi dilakukan secara satu per satu bertujuan agar keterangan yang mereka berikan tetap bersifat bebas. Mengenai masalah penentuan saksi mana yang lebih dulu didengar keterangannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Saksi yang menjadi korban tindak pidana yang mendapat urutan pertama didengar keterangannya dalam persidangan
- 2) Kemudian baru menyusul pemeriksaan keterangan saksi-saksi selebihnya, menurut urutan yang dianggap dan dipandang baik oleh ketua sidang setelah lebih dulu mendengar pendapat dari penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum
- 3) Namun sama sekali tidak menutup kemungkinan untuk membelakangi pemeriksaan keterangan saksi korban dan memberi urutan pertama kepada saksi lain jika hal itu dianggap lebih baik oleh ketua sidang setelah lebih dulu mendengar pendapat terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum.

b. Memeriksa Identitas Saksi

Sebelum sidang mendengarkan keterangan saksi, terlebih dahulu menanyakan identitas dan mencocokkan dengan berita acara yang dibuat penyidik. Pemeriksaan identitas saksi meliputi:

- 1) Nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir (umur), jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, pekerjaan, dan agama.
- 2) Disamping pemeriksaan identitas, ketua sidang menanyakan dan memeriksa saksi:
 - a) Apakah saksi kenal dengan terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya
 - b) Apakah saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah atau hubungan keluarga semenda dengan terdakwa, atau apakah antara saksi dengan terdakwa terjalin hubungan suami istri sekalipun telah bercerai
 - c) Apakah antara saksi dengan terdakwa ada dan pernah terikat hubungan kerja.

Maksud pemeriksaan identitas serta hubungan saksi dengan terdakwa untuk memberikan penjelasan dalam persidangan tentang kedudukan saksi dalam perkara yang sedang diperiksa. Dengan mengetahui kedudukan saksi dengan perkara yang diperiksa, merupakan titik tolak bagi ketua sidang menentukan sikap perlu tidaknya saksi didengar keterangannya

maupun untuk menentukan kualitas keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan. Demikian pula halnya dengan pemeriksaan kekeluargaan, baik hubungan sedarah dan semenda. Adanya hubungan sedarah atau perkawinan, menyebabkan saksi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri menjadi saksi, atau ada pula yang dilarang untuk menjadi saksi maupun yang mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa karena kemungkinan besar cenderung memberi keterangan yang tidak sebenarnya.

c. Saksi wajib mengucapkan sumpah

Sebelum keterangannya didengar dalam persidangan, saksi wajib terlebih dulu mengucapkan sumpah atau janji⁶⁶. Sumpah atau janji tidak mutlak harus diucapkan sebelum saksi memberi keterangan. Saksi lebih dulu disumpah sebelum memberikan keterangan agar lebih sadar diri dan hati sanubarinya untuk bersikap jujur dalam memberi keterangan. Lain halnya jika lebih dulu memberi keterangan, menyebabkan saksi kurang merasa dibebani oleh suatu hal yang suci dan gaib, sekalipun disumpah setelah selesai memberi keterangan. Berdasarkan alasan yang dikemukakan, pengucapan sumpah atau janji harus dilakukan sebelum saksi memberi keterangan⁶⁷. Sebagai tambahan, keterangan saksi ataupun ahli yang tidak disertai sumpah atau

⁶⁶ Pasal 160 ayat (3) KUHP

⁶⁷ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)** Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 174

janji, tidak mempunyai nilai kekuatan hukum. Oleh karena pengucapan sumpah merupakan suatu kewajiban, menyebabkan tidak ada alternatif lain bagi seorang saksi untuk menolak mengucapkan sumpah, kecuali penolakan tersebut mempunyai alasan yang sah. Saksi yang diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah ialah mereka yang disebut pada Pasal 161, yaitu anak yang belum cukup umur dan belum pernah menikah, serta orang yang sakit jiwanya atau sakit ingatan.

d. Kesempatan mengajukan pertanyaan kepada saksi

Kewajiban utama saksi ialah memberikan keterangan dan demi untuk memperoleh keterangan yang luas dan hakiki. Kewajiban saksi bukan hanya memberikan keterangan saja tetapi juga berkewajiban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Saksi tidak boleh menolak setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sepanjang pertanyaan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau sepanjang pertanyaan tersebut relevan dengan perkara yang diperiksa. Menurut Pasal 164 ayat (2) dan Pasal 165 ayat (1) dan (2), yang dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi pada pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu:

- 1) Ketua sidang serta hakim anggota dapat meminta kepada saksi atau dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi atas segala keterangan yang dianggap perlu untuk mendapat kebenaran

2) Disamping ketua sidang dan hakim anggota, penuntut umum berhak dan diberi kesempatan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Biasanya kesempatan diberikan setelah ketua sidang dan hakim anggota selesai mengajukan pertanyaan.

3) Kepada terdakwa atau penasihat hukum juga harus diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Dengan memberi hak dan kesempatan kepada penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada saksi, sepantasnya pula hak dan kesempatan ini diberikan juga kepada terdakwa dan penasihat hukum

3. Pemeriksaan Saksi Verbalisan Di Pengadilan

a. Saksi Verbalisan Berdasarkan KUHAP

Pengertian mengenai saksi telah diatur dalam KUHAP yang mana dalam pengertiannya menyebutkan bahwa keterangan yang diberikan saksi haruslah keterangan yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri. Namun dengan dikeluarkannya Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 memberikan perluasan definisi saksi maupun keterangan saksi menjadi keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, peradilan yang tidak selalu ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri. Dengan adanya perluasan definisi tersebut, dapat memberikan kemungkinan bagi saksi verbalisan untuk dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi. Namun sebelumnya perlu

dilihat terlebih dahulu mengenai penggunaan saksi verbalisan pada salah contoh kasus dalam Putusan Nomor 529 K/PID/2016.

1) Pokok Perkara

Kasus ini berawal pada hari Minggu, 21 Juni 2015, terdakwa dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain pada saat terjadi tawuran antara warga Perumahan Margahayu dengan warga Kampung Rawa Semut. Tawuran ini terjadi sebagai aksi balas dendam atas tawuran yang sebelumnya terjadi pada hari Kamis, 18 Juni 2015 yang menimbulkan korban luka dari pihak warga Margahayu. Terdakwa yang merupakan warga Margahayu, pada saat kejadian telah membawa cocor bebek dan langsung mengayunkannya ke punggung belakang sebelah kanan korban yang merupakan warga Rawa Semut yang juga sedang ikut tawuran. Terdakwa langsung kabur saat itu juga ketika telah berhasil melukai korban, sedangkan korban oleh temannya langsung dibawa ke rumah sakit namun korban tidak dapat bertahan dan meninggal dunia.

2) Alat Bukti

1. Keterangan Saksi

Saksi yang diperiksa dipersidangan berjumlah 20 (dua puluh) saksi yang terdiri dari 10 (sepuluh) saksi *a charge* dan 10 saksi *ade charge*. Pada

keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi *a charge* atau saksi yang memberatkan, pada intinya menyatakan bahwa saksi melihat orang yang telah membacok korban dengan menggunakan cocor bebek dari jarak 3m-20m dari TKP dengan disertai ciri-ciri yang sesuai dengan terdakwa. Diantara para saksi tersebut, terdapat 3 (tiga) saksi verbalisan yang dimintai keterangannya. Adapun keterangan yang disampaikan oleh para saksi verbalisan diantaranya:

a. Saksi Verbalisan I

Pada hari Minggu, 21 Juni 2015, saksi mendapat informasi dari anggota Polisi di TKP bahwa telah terjadi tawuran dan ada korban meninggal. Saksi menemui hansip lepas dan bertemu salah satu orang, sebut saja S, yang berkaitan dengan tawuran sebelumnya yaitu pada tanggal 18 Juni 2015.

Dari keterangan yang disampaikannya, bahwa kejadian tawuran tanggal 21 Juni 2015 ada kaitannya dengan tawuran tanggal 18 Juni 2015 yang mana warga Margahayu dibuat mundur oleh warga Rawa Semut yang menyebabkan adik dari S terluka dibagian

matanya. Kemudian tawuran pada tangga 21 Juni 2015 warga Rawa Semutlah yang dibuat mundur dan timbul korban meninggal dari warga Rawa Semut. Ketika saksi meminta keterangan S, ia mengatakan bahwa ia meminta bantuan terdakwa untuk membalas adiknya yang terluka akibat tawuran sebelumnya. Saksi mengatakan bahwa ia telah mendapat informasi dari keterangan S, pelakunya berambut panjang, bertato, dan membawa senjata cocor bebek. Kemudian saksi menggeledah kontrakan tempat berkumpul beberapa pemuda warga Margahayu dan menemukan 2 (dua) cocor bebek di dekat tempat tidur terdakwa dan diakui milik terdakwa. Dalam keterangannya, saksi verbalisan mengatakan bahwa terdakwa dan saksi yang diinterogasi tidak dipukuli ataupun diancam serta tidak dilakukan sidik jari dan DNA atas barang bukti yang ada.

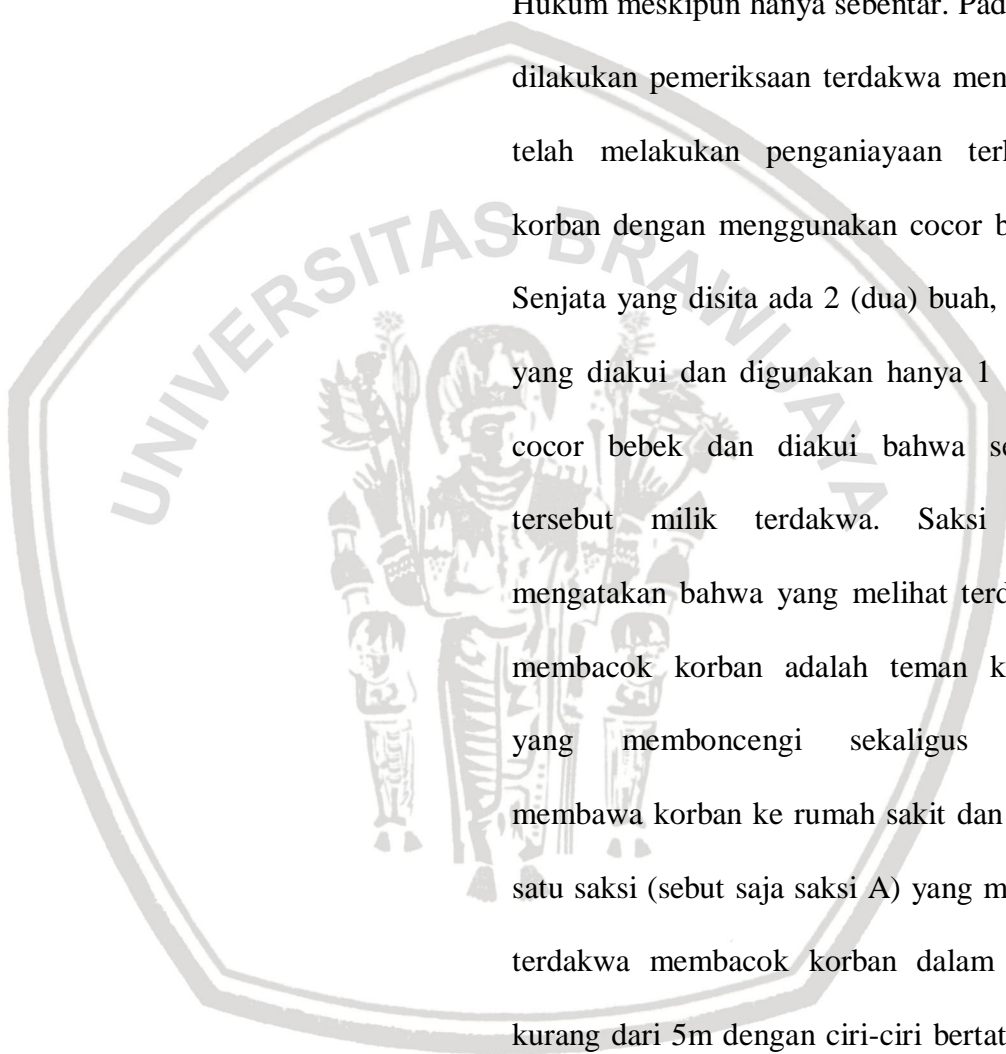
b. Saksi Verbalisan II

Saksi merupakan Anggota Polres Bekasi yang memeriksa terdakwa dalam kasus

penganiayaan yang terjadi. Saksi mengatakan bahwa saat pemeriksaan dilakukan, tidak dengan tekanan atau pemukulan serta terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan didampingi Penasihat Hukum meskipun hanya sebentar. Pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan cocor bebek. Senjata yang disita ada 2 (dua) buah, tetapi yang diakui dan digunakan hanya 1 (satu) cocor bebek dan diakui bahwa senjata tersebut milik terdakwa. Saksi juga mengatakan bahwa yang melihat terdakwa membacok korban adalah teman korban yang memboncengi sekaligus yang membawa korban ke rumah sakit dan salah satu saksi (sebut saja saksi A) yang melihat terdakwa membacok korban dalam jarak kurang dari 5m dengan ciri-ciri bertato dan memakai baju sweater.

c. Saksi Verbalisan III

Saksi merupakan Anggota Polres Bekasi selaku pemeriksa Berita Acara Tambahan.



Pada saat dilakukannya pemeriksaan tambahan, terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak ada tekanan atau pemukulan terhadap terdakwa

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap saksi *ade charge* atau saksi yang meringankan, yang mana para saksi menyatakan bahwa pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban bukanlah terdakwa. Kemudian 4 (empat) dari total 10 (sepuluh) saksi juga mengatakan bahwa mereka dipukul dan dipaksa untuk mengaku jika pelakunya adalah terdakwa.

2. Keterangan Ahli

Terdapat 2 (dua) saksi ahli yang dihadirkan dipersidangan, 1 diantaranya yakni saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, dan 1 saksi ahli lainnya adalah saksi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Keterangan yang disampaikan saksi ahli dari pihak jaksa penuntut umum pada intinya menyatakan bahwa barang bukti berupa cocor bebek lebih tepat menghasilkan luka pada korban dibandingkan dengan menggunakan clurit. Sedangkan keterangan saksi ahli dari pihak terdakwa atau penasihat hukum

menyatakan bahwa barang bukti cocor bebek tersebut tidak tajam dan tidak menghasilkan luka seperti yang ada pada korban. Namun pernyataan tersebut tidak berdasarkan pemeriksaan langsung, melainkan dari hasil visum dan foto.

3. Keterangan Terdakwa

Terdakwa dalam keterangannya menyampaikan bahwa keterangan yang dibuat penyidik dalam BAP mengenai pengakuan terdakwa tentang pembacokan menggunakan cocor bebek tersebut dibantah karena semua keterangan tersebut diakuinya karena adanya tekanan, paksaan, dan pemukulan terhadap terdakwa.

3) Tuntutan

1. Menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan mati”, sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga, Pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 6 (enam) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah senjata jenis cocor bebek;
 - b. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah jaket warna merah;

- d. 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- e. 1 (satu) celana dalam cokelat;
- f. 1 (satu) celana pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa

4) Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan kasus tersebut, terdapat beberapa dasar pertimbangan hakim yang didalamnya melibatkan saksi verbalisan, diantaranya:

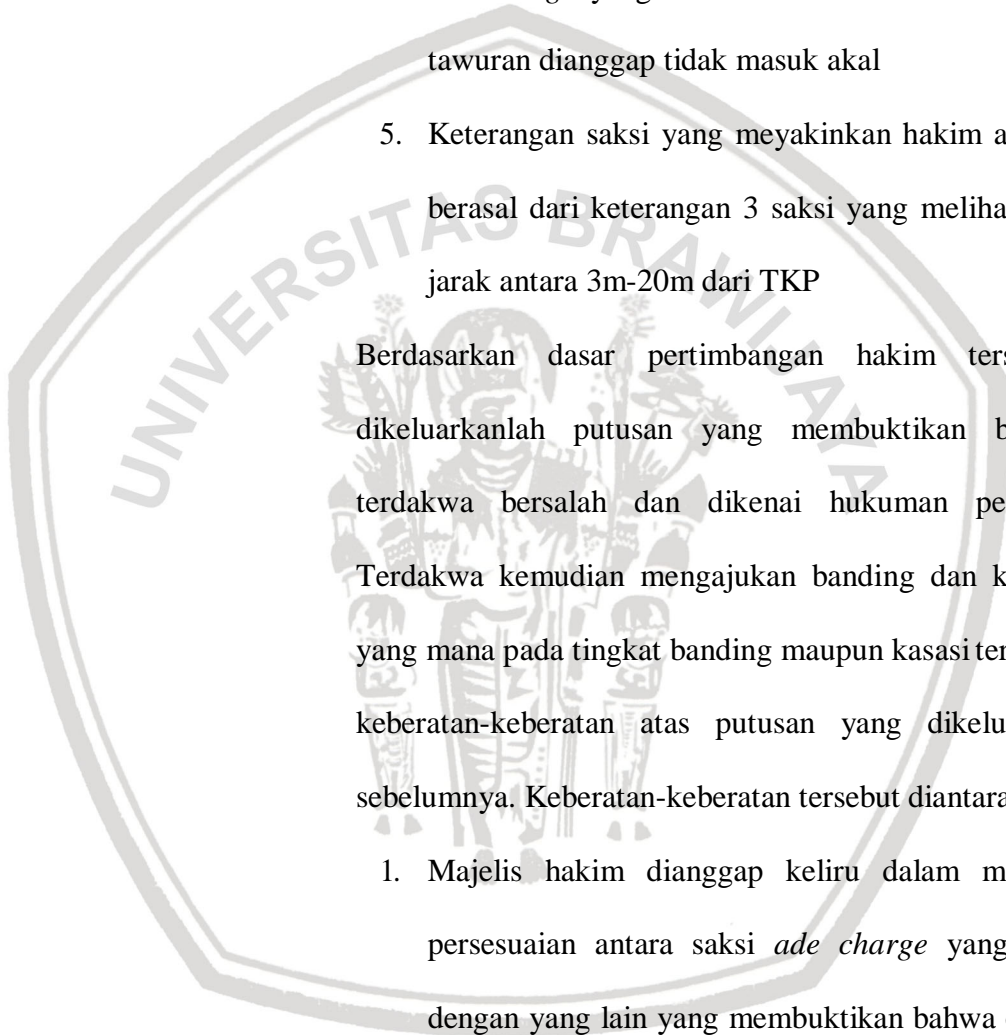
- 1. Ditemukannya beberapa fakta yang salah satunya yaitu terdakwa menarik keterangannya dalam BAP penyidik dengan alasan terdakwa dipukul dan dilakban petugas sehingga terdakwa mengakuinya
- 2. Berdasarkan keterangan 3 (tiga) saksi yang dekat dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) maupun keterangan 3 saksi verbalisan, menyatakan bahwa korban yang berada dalam tawura memperoleh bacokan dari seseorang yang memiliki ciri-ciri berbadan gemuk, gondrong, dan bertato yang mana ciri-ciri tersebut menunjukkan ciri-ciri terdakwa
- 3. Berdasarkan keterangan saksi verbalisan dan salah satu saksi *ade charge*, terdapat 2 (dua) cocor bebek

di kontrakan tempat berkumpul pemuda Margahayu

4. Mengesampingkan keterangan saksi *ade charge* yang menyatakan bahwa terdakwa berada di belakang dan jauh dari TKP, karena semua saksi *ade charge* yang tidak melihat cocor bebek saat tawuran dianggap tidak masuk akal
5. Keterangan saksi yang meyakinkan hakim adalah berasal dari keterangan 3 saksi yang melihat dari jarak antara 3m-20m dari TKP

Berdasarkan dasar pertimbangan hakim tersebut, dikeluarkanlah putusan yang membuktikan bahwa terdakwa bersalah dan dikenai hukuman penjara. Terdakwa kemudian mengajukan banding dan kasasi, yang mana pada tingkat banding maupun kasasi terdapat keberatan-keberatan atas putusan yang dikeluarkan sebelumnya. Keberatan-keberatan tersebut diantaranya:

1. Majelis hakim dianggap keliru dalam melihat persesuaian antara saksi *ade charge* yang satu dengan yang lain yang membuktikan bahwa orang yang telah menghilangkan nyawa korban bukanlah terdakwa.

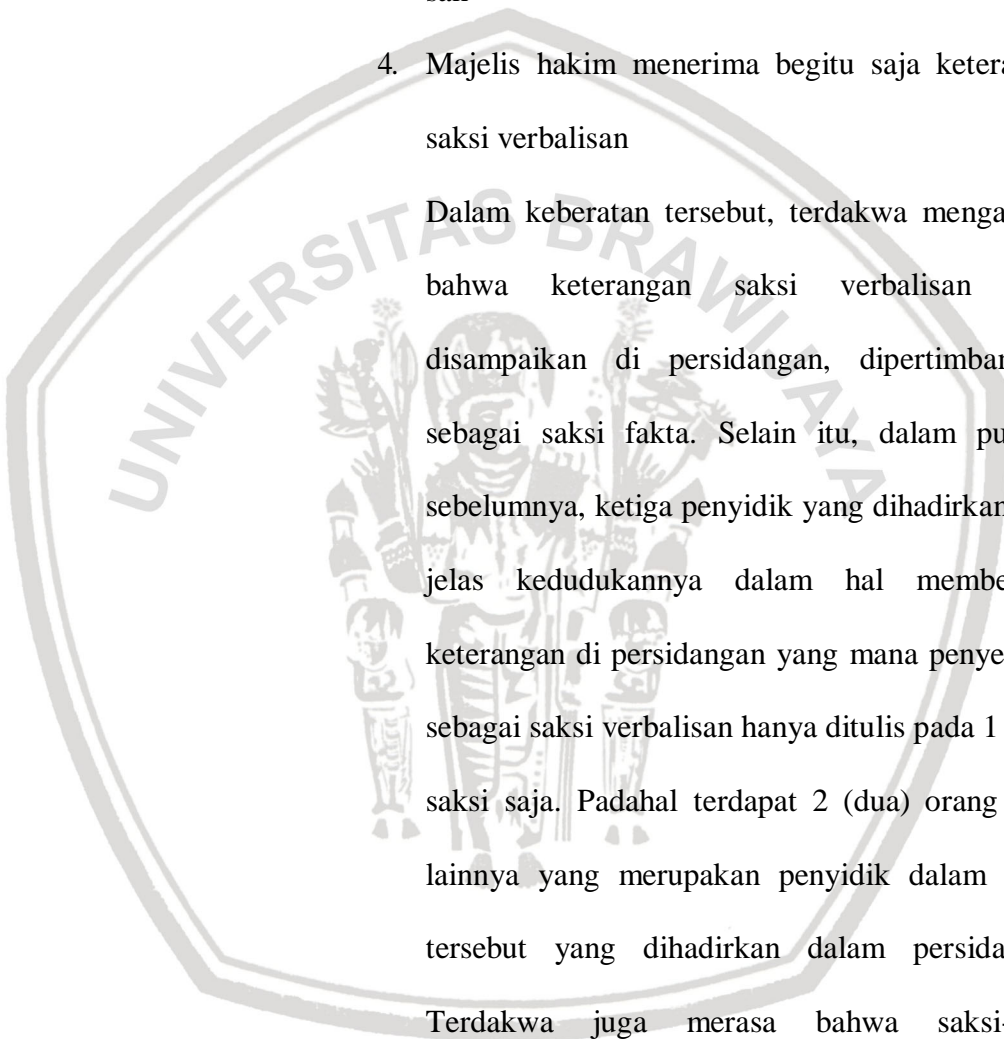


2. Majelis hakim mengabaikan fakta mengenai adanya penyiksaan atau kekerasan dalam proses penyidikan
3. Majelis hakim keliru menjadikan BAP yang dibacakan di persidangan sebagai alat bukti yang sah
4. Majelis hakim menerima begitu saja keterangan saksi verbalisan

Dalam keberatan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi verbalisan yang disampaikan di persidangan, dipertimbangkan sebagai saksi fakta. Selain itu, dalam putusan sebelumnya, ketiga penyidik yang dihadirkan tidak jelas kedudukannya dalam hal memberikan keterangan di persidangan yang mana penyebutan sebagai saksi verbalisan hanya ditulis pada 1 (satu) saksi saja. Padahal terdapat 2 (dua) orang saksi lainnya yang merupakan penyidik dalam kasus tersebut yang dihadirkan dalam persidangan.

Terdakwa juga merasa bahwa saksi-saksi verbalisan memiliki kepentingan dalam kasus tersebut.

5. Majelis hakim mengesampingkan keterangan saksi ahli Dokter Forensik yang dihadirkan terdakwa



Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut, majelis hakim di tingkat kasasi membuat dasar-dasar pertimbangan yaitu:

1. Majelis hakim menganggap bahwa keberatan-keberatan terdakwa tidak dapat diterima karena *judex factii* tidak salah menerapkan hukum dalam perkara terdakwa
 2. Keberatan mengenai penilaian dari hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, tidak dapat dipertimbangkani dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi
 3. Putusan *judex facti* dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang
- 5) Putusan
- Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1058/Pid.B/2015/PN.Bks. yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan mati”;
 2. Menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 5 (lima) tahun;
 3. Menetapkan masa penahananana yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di tahanan;

5. Menetapkan barang bukti:

1 (satu) bilah senjata cocor bebek;

Dimusnahkan;

1 (satu) buah kaos warna hitam;

1 (satu) buah jaket warna merah;

1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;

1 (satu) celana dalam warna cokelat;

1 (satu) buah celana pendek warna biru;

6. Membebaskan biaya perkara pada terdakwa sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 52/Pid/2016/PT.Bdg. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan jaksa penuntut umum dan terdakwa melalui penasihat hukumnya;

2. Memperbaiki putusan PN Bekasi Nomor 1058/Pid.B/2015/PN.Bks. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, yang dalam amarnya berbunyi:

a Meyakinkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak

pidana “penganiayaan mengakibatkan mati”;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 6 (enam) tahun;
- c. menguatkan putusan selebih dan selainnya;
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- e. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp 2.500

Putusan Mahkamah Agung Nomor 529 K/Pid/2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari terdakwa tersebut;
2. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan contoh kasus dalam putusan di atas, diketahui bahwa saksi verbalisan dipanggil dan diperiksa di pengadilan yang dilakukan dengan alasan bahwa saksi dan terdakwa dalam memberikan keterangannya berbeda dengan keterangan yang disampaikan pada saat penyidikan karena mereka mengatakan ada unsur kekerasan saat proses pemeriksaan penyidikan berlangsung. Hal itulah yang menyebabkan saksi verbalisan dipanggil dan dimintai keterangannya. Jika melihat tujuan dari dipiksanya

saksi verbalisan di pengadilan adalah bukan untuk dimintai keterangannya mengenai tindak pidana yang terjadi, maka keterangan yang disampaikan oleh saksi verbalisan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi. Hal ini disebabkan karena walaupun definisi mengenai saksi telah diperluas dengan dikeluarkannya Putusan MK menjadi keterangan yang tidak selalu ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri, namun dalam putusan tersebut menghendaki adanya relevansi atau keterkaitan dengan tindak pidana yang terjadi atau lebih tepatnya mementingkan adanya relevansi dengan pokok perkara yang diproses dibandingkan mengenai apakah ia melihat, mendengar, atau mengalaminya sendiri. Sedangkan keterangan yang disampaikan oleh saksi verbalisan tentu keterangan yang bukan ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri tetapi tidak memiliki relevansi dengan perkara yang sedang diproses melainkan hanya mengklarifikasi mengenai benar atau tidaknya telah terjadi pemaksaan, kekerasan, dan pemukulan saat pemeriksaan penyidikan.

Dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 ini sebenarnya hanya mengubah definisi saksi yang benar-benar memiliki keterkaitan atau relevansi dengan tindak pidana yang terjadi. Maksudnya adalah putusan tersebut lebih mementingkan relevansi kesaksian yang diberikan daripada mengenai keterangan yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri. Sedangkan keterangan

yang tidak memiliki relevansi atau keterkaitan dengan tindak pidana yang terjadi seperti keterangan yang disampaikan oleh saksi verbalisan, yang mana menyebabkan saksi verbalisan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi. Kembali lagi kepada tujuan dari dipanggil dan diperiksa saksi verbalisan adalah hanya untuk memberikan klarifikasi mengenai benar atau tidaknya telah terjadi unsur kekerasan pada saat proses pemeriksaan penyidikan. Sudah tentu bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi verbalisan bukanlah keterangan terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Namun, keterangan dari saksi verbalisan tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk membuktikan kebenaran bantahan terdakwa terhadap isi BAP.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baikantara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya⁶⁸. Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Alasan mengapa keterangan dari saksi verbalisan dijadikan sebagai petunjuk adalah bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi verbalisan tersebut merupakan keterangan yang berkaitan dengan pengklarifikasian mengenai bantahan saksi dan terdakwa

⁶⁸ Pasal 188 ayat (1) KUHP

terhadap BAP dan bukanlah terkait dengan tindak pidana, yang mana keterangan dari saksi verbalisan tersebut disesuaikan dengan keterangan terdakwa maupun BAP (surat). Dengan demikian, keterangan yang disampaikan oleh saksi verbalisan dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan kebenaran atau memberikan klarifikasi mengenai bantahan dari saksi dan terdakwa terhadap BAP yang kemudian dapat menuju pada petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa.

Saksi verbalisan merupakan istilah yang lazim tumbuh dalam prakteknya dan tidak diatur oleh KUHAP. Walaupun tidak diatur secara eksplisit didalam KUHAP, pemanggilan saksi verbalisan dilatarbelakangi dari Pasal 163 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”.

Berdasarkan Pasal 163 KUHAP tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Ketua sidang wajib memperingatkan saksi atas perbedaan keterangan di persidangan dengan keterangan yang ada pada berita acara
- 2) Jika ketua sidang sudah memperingatkan saksi, namun ia tetap bersikukuh pada keterangan yang diberikannya

dipersidangan, maka hakim harus meminta keterangan mengenai perbedaan antara keterangan dimaksud

- 3) Keterangan dan alasan yang diberikan saksi kemudian dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan

Pada dasarnya, ketentuan Pasal 163 KUHAP sama sekali tidak menyebutkan mengenai saksi verbalisan melainkan hanya menyebutkan tentang kewajiban hakim untuk mengingatkan saksi serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada. Kalimat “meminta keterangan” yang ada pada Pasal 163 KUHAP tersebut juga tidak ditujukan bagi saksi verbalisan dan lebih ditujukan kepada saksi yang memberikan keterangan di persidangan berbeda dengan keterangan yang ada pada berita acara. Namun, apabila keterangan dan alasan yang telah diberikan saksi atas perbedaan keterangan yang diberikan di sidang pengadilan dan yang diberikan di depan penyidik kurang memberi penilaian pada hakim, pada prakteknya hakim dapat memanggil dan meminta keterangan dari saksi verbalisan atau penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi.

Tidak hanya terbatas pada keterangan saksi, apabila dalam persidangan terdakwa mencabut keterangannya pada waktu pemeriksaan penyidikan maka majelis hakim atau jakta penuntut umum dapat memanggil saksi verbalisan ke dalam persidangan. Alasan yang paling sering dipergunakan ketika terjadi perbedaan keterangan di persidangan dengan keterangan yang ada dalam

berita acara penyidikan adalah terdakwa dan/atau saksi ketika diperiksa dalam penyidikan ditekan, dipaksa, diancam, dipukul, ataupun disiksa.

b. Proses Pemeriksaan Saksi Verbalisan di Persidangan

Mengenai proses pemeriksaan saksi telah dijelaskan sebelumnya mulai dari pemanggilan saksi, pemeriksaan identitas, hingga pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan kepada saksi. Apabila proses dari pemeriksaan saksi yang telah diatur dalam KUHAP tersebut dikaitkan dengan pemeriksaan saksi verbalisan, maka dapat ditemukan uraian sebagai berikut:

1) Kewajiban hukum sebagai saksi

Setiap warga negara dibebankan suatu kewajiban untuk memberikan keterangannya sebagai seorang saksi dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Setiap warga negara disini diartikan bahwa semua orang tanpa terkecuali memiliki kewajiban untuk menjadi seorang saksi ketika keterangannya diperlukan. Bagi yang menolak untuk memberikan keterangannya sebagai saksi akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena penyidik juga merupakan warga negara, maka penyidik juga berhak untuk memberikan keterangannya sebagai saksi.

2) Pemeriksaan identitas saksi

Pemanggilan saksi verbalisan juga diawali dengan pemeriksaan identitas dari saksi verbalisan tersebut. Pemeriksaan identitas saksi verbalisan ini dilakukan sama dengan pemeriksaan identitas saksi pada umumnya guna mengetahui kedudukan saksi dalam perkara. Namun, terdapat hal yang membedakan antara pemeriksaan identitas saksi biasa dengan saksi verbalisan. Jika pada saksi biasa, pemeriksaan identitas dilakukan dengan mencocokkan identitas yang ada pada berita acara yang dibuat penyidik. Sedangkan pada saksi verbalisan, pemeriksaan identitas tidak dilakukan dengan mencocokkannya pada identitas yang ada pada berita acara, karena pemanggilan dan pemeriksaan saksi verbalisan hanya dilakukan pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Walaupun demikian, telah terlihat dengan jelas bahwa kedudukan saksi adalah sebagai penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi

3) Kewajiban mengucapkan sumpah

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa saksi wajib disumpah sebelum memberikan keterangannya. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan kesadaran diri untuk bersikap jujur dalam memberikan keterangannya. Dengan adanya ketentuan tersebut, menyebabkan saksi verbalisan juga harus disumpah sebelum memberikan keterangannya

di sidang pengadilan karena saksi verbalisan tidak termasuk kelompok yang dikecualikan dari kewajiban untuk disumpah. Mereka yang dikecualikan dari kewajiban untuk disumpah hanyalah anak-anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun serta belum pernah kawin serta orang yang sakit ingatannya atau sakit jiwa.

4) Pengajuan pertanyaan kepada saksi

Seperti halnya dengan saksi-saksi pada umumnya, saksi verbalisan juga wajib memberikan keterangan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya yang mana tentu harus relevan dengan perkara yang diperiksa dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya berupa pertanyaan yang timbul dari adanya perbedaan keterangan yang disampaikan saksi biasa. Secara formal, majelis hakim akan memberikan pertanyaan kepada penyidik yang mana pertanyaan-pertanyaan tersebut garis besarnya antara lain⁶⁹:

- a) Apakah benar yang memeriksa terdakwa dan/atau saksi pada waktu penyidikan adalah Saudara?
- b) Apakah saat melakukan pemeriksaan, Saudara menggunakan cara-cara yang menekan, memaksa, mengancam, memukul, atau menyiksa?

⁶⁹ Alfitra, *op.cit*, hlm. 66.

- c) Apakah berita acara penyidikan sebelum dibubuhkan tanda tangan oleh terdakwa dan/atau saksi sudah Saudara bacakan terlebih dahulu?
- d) Apakah saudara diwaktu menyuruh terdakwa dan/atau saksi untuk menandatangani berita acara penyidikan dilakukan dengan cara menekan, memaksa, mengancam, memukul, atau menyiksa?

Oleh penyidik kemudian memberi jawaban sebagai

berikut:

- a) Benar adanya bahwa yang memeriksa diri terdakwa dan/atau saksi adalah saksi
- b) Saksi dalam memeriksa tidak memaksa, menekan, mengancam, memukul, atau menyiksa terdakwa dan/atau saksi
- c) Saat terdakwa dan/atau saksi menandatangani berita acara penyidikan tidak dalam keadaan dipaksa
- d) Berita acara terlebih dahulu dibacakan sebelum terdakwa dan/atau saksi menandatangani dan tidak menekan, memaksa, atau mengancam.

Jawaban seperti yang disebut di atas pasti akan keluar dari penyidik. Hal itu karena secara pemikiran setiap orang akan mempunyai kecenderungan untuk membenarkan apa yang dilakukan. Tidak kalah pentingnya juga bahwa setiap

orang akan cenderung menjaga nama korpsnya⁷⁰. Meskipun demikian, seorang hakim tentu saja tidak langsung percaya akan keterangan saksi verbalisan atau menolak keterangan yang diberikan tersebut. Dengan adanya hal tersebut, ada beberapa hal yang mungkin terjadi diantaranya:

- a) Ada kemungkinan bahwa benar penyidik tidak melakukan penekanan, memaksa, mengancam, memukul atau menyiksa diri terdakwa dan/atau saksi
- b) Kemungkinan benar adanya bahwa penyidik melakukan penekanan, memaksa, mengancam, memukul atau menyiksa diri terdakwa dan/atau saksi
- c) Atau ada kemungkinan penyidik tidak melakukannya, melainkan anggota lainlah yang melakukan perbuatan tersebut.

Terlepas dari praktek-praktek demikian, dengan kehadiran seorang penyidik dalam persidangan, hakim dapat mencari tahu latar belakang suatu perkara secara kronologis mengenai apakah sebelumnya telah mencukupi alat-alat bukti permulaan sebelum penyidikan dilakukan terhadap seseorang. Pada intinya dengan bertanya kepada penyidik, dapat diketahui dengan lengkap mulai dari laporan ataupun

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 67

pengaduan mengenai adanya tindak pidana hingga ditemukannya alat-alat bukti permulaan yang cukup.⁷¹

4. Keabsahan Pemeriksaan Saksi Verbalisan Berdasarkan KUHAP

Pada penjelasan sebelumnya, jika dilihat dari proses pemeriksaan saksi di persidangan, proses pemeriksaan dari saksi verbalisan juga tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan saksi pada umumnya seperti pemeriksaan identitas, pengucapan sumpah, hingga kewajiban guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Kemudian jika dilihat berdasarkan definisi saksi yang diatur di dalam KUHAP sebagaimana telah diubah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, saksi verbalisan dapat memberikan keterangannya walaupun keterangan tersebut bukan keterangan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Namun keterangan yang diberikan tersebut bukanlah keterangan mengenai tindak pidana yang terjadi melainkan hanya keterangan untuk mengklarifikasi mengenai benar atau tidaknya telah terjadi pemukulan, pemaksaan, dan pengancaman terhadap saksi dan terdakwa saat proses pemeriksaan penyidikan yang mana menyebabkan saksi dan terdakwa mencabut keterangannya. Hal ini menyebabkan keterangan yang disampaikan oleh saksi verbalisan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi karena keterangan yang diakui sebagai alat bukti adalah keterangan yang memiliki relevansi dengan pokok perkara yang sedang berlangsung seperti yang dikehendaki oleh putusan MK tersebut. Walaupun keterangan yang

⁷¹ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 143.

disampaikan oleh saksi verbalisan tidak diakui sebagai alat bukti keterangan saksi, namun dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan kebenaran mengenai bantahan terdakwa terhadap isi dari BAP yang kemudian dapat menuju pada petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Meskipun pengaturan mengenai saksi verbalisan tidak diatur di dalam KUHAP ataupun peraturan perundang-undangan yang lainnya, proses dari pemeriksaan saksi verbalisan tersebut tidak terlepas dari aturan yang mengatur tentang pemeriksaan saksi pada umumnya yang telah diatur di dalam Pasal 160 sampai Pasal 170 KUHAP. Oleh sebab itu, pemanggilan dan pemeriksaan dari saksi verbalisan di persidangan dianggap telah memenuhi ketentuan yang telah ada pada KUHAP walaupun secara eksplisit saksi verbalisan tidak diatur di dalam KUHAP maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya.

B. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Verbalisan

1. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi menurut KUHAP

Alat bukti yaitu segala hal yang memiliki hubungan atau relasi dengan suatu perbuatan, yang mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk membentuk keyakinan hakim atas kebenaran mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa⁷². Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam Pasal 185

⁷² Alfitra, *op.cit*, hlm. 23.

sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Arti kekuatan alat bukti yaitu seberapa jauh kekuatan alat bukti tersebut masing-masing dalam hukum pembuktian yang dijelaskan dalam:

- a. Pasal 185 KUHAP, mengatur penilaian keterangan saksi
- b. Pasal 186 KUHAP, mengatur penilaian keterangan ahli
- c. Pasal 187 KUHAP, mengatur penilaian surat
- d. Pasal 188 KUHAP, mengatur penilaian petunjuk
- e. Pasal 189 KUHAP, mengatur penilaian keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dan pertama dalam perkara pidana. Tidak ada peristiwa pidana yang lepas dari pembuktian keterangan saksi. Hampir seluruh pembuktian perkara pidana selalu terdapat pemeriksaan keterangan saksi yang dibantu dengan alat bukti yang lain. Dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP memberikan penjelasan mengenai pengertian dari keterangan saksi yang mana merupakan salah satu alat bukti yang dipergunakan dalam perkara pidana. Dalam penjelasan sebelumnya, saksi verbalisan dapat dikategorikan sebagai saksi yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 1 angka 27 KUHAP sebagaimana telah diubah maknanya dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010. Hal ini memberikan kemungkinan bagi saksi verbalisan memiliki kekuatan pembuktian sebagai saksi yang diatur dalam KUHAP.

Mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi diatur di dalam Pasal 185 KUHAP yang isinya:

- (1) “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan

- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai suatu alat bukti sah lainnya
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu
- (5) Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diuraikan mengenai nilai pembuktian keterangan saksi yaitu sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi diberikan di sidang pengadilan

Keterangan saksi sebagai alat bukti yakni mengenai hal yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan yang bertitik berat sebagai alat bukti ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian. Jika dikaitkan dengan ketentuan

Pasal 1 angka 27 KUHAP, yang harus dijelaskan dalam persidangan adalah mengenai apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri, atau alami sendiri dengan menyebutkan alasannya. Namun dengan adanya Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, ketentuan dalam KUHAP mengenai keterangan saksi yang harus ia lihat sendiri, ia alami sendiri, dan ia dengar sendiri tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan mengenai keterangan saksi tersebut dimaknai menjadi keterangan yang tidak selaluvia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dengan demikian, keterangan saksi yang disampaikan di luar sidang (*outside the court*) tidak memiliki kekuatan alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

b. Satu saksi bukan saksi (*unnus testisinullus testis*)

Di dalam KUHAP menganut asas *unnus testis nullus testis* yang maknanya satu saksi bukan merupakan saksi. Sekurang-kurangnya diperlukan dua kesaksian untuk pembuktian yang sah. Hal ini dapat diartikan jika alat bukti yang dihadirkan hanya terdiri dari satu orang saja tanpa ditambah keterangan saksi yang lain (kesaksian tunggal), maka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup guna membuktikan kesalahan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi. Walaupun jika halnya keterangan saksi tunggal tersebut sudah jelas, namun terdakwa tidak mengakuinya serta keterangan saksi tunggal tersebut tidak dicukupi dengan alat bukti yang lain, kesaksian tersebut harus dinyatakan tidak

memiliki nilai kekuatan pembuktian dengan alasan *unnus testis nullus testis*. Berbeda halnya jika terdakwa menyampaikan yang mengakui kesalahannya atas tindak pidana yang terjadi. Dalam hal ini seorang saksi sudah cukup untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa karena disamping keterangan saksi tunggal tersebut juga disertai alat bukti yang lain yaitu keterangan atau pengakuan terdakwa. Dengan ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan *the degree of evidence*, yakni keterangan saksi dengan alat bukti keterangan terdakwa⁷³. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk membuktikan kesalahan terdakwa minimal harus didukung oleh 2 (dua) orang saksi
- 2) Jika saksi yang ada hanya seorang saksi saja, maka kesaksian tunggal tersebut harus ditambah alat bukti yang lain

c. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Keterangan saksi tidak bisa berdiri sendiri walaupun saksi yang dihadirkan di sidang pengadilan secara jumlah (kuantitatif) telah melampaui batas minimum pembuktian dan belum tentu keterangan mereka memadai sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan saksi yang

⁷³ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 288

diberikan harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain agar dapat mewujudkan kebenaran atas suatu tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) terlihat bahwa keterangan beberapa orang saksi dapat dinilai sebagai alat bukti serta memiliki nilai pembuktian apabila keterangan para saksi mempunyai hubungan serta saling menguatkan mengenai kebenaran suatu tindak pidana.

Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi adalah bersifat bebas yang artinya seorang hakim memiliki kebebasan untuk menolak atau menerima isi keterangan saksi yang diberikan dipersidangan. Terdapat pula ketentuan yang wajib diperhatikan hakim dalam menilai keterangan saksi tersebut, yaitu dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP. Dalam pasal tersebut menerangkan mengenai persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain beserta alasannya, yang mana persesuaian tersebut dilakukan agar menemui titik pertemuan antara satu sama lain. Persesuaian antara keterangan yang disampaikan saksi dengan alat bukti yang lain juga perlu diperhatikan mengingat alat bukti yang ada tidak hanya mengenai keterangan saksi saja.

d. Saksi harus disumpah

Keterangan saksi dianggap dapat mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti apabila saksi tersebut disumpah agar ia memberikan keterangan yang sebenarnya. Apabila seorang

saksi dalam memberikan keterangannya tidak disumpah, maka keterangan tersebut dianggap tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, meskipun keterangan yang diberikan tersebut saling bersesuaian dengan yang lain. Namun, keterangan saksi yang tidak disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah⁷⁴, yaitu dapat menguatkan keyakinan hakim seperti yang ada pada Pasal 161 ayat (2) KUHAP dan dapat digunakan sebagai petunjuk dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP. Keterangan saksi tanpa sumpah ini tidak serta merta dapat dipergunakan sebagai tambahan menyempurnakan kekuatan alat bukti yang sah, melainkan harus disertai dengan syarat:

- 1) Terlebih dahulu harus ada alat bukti yang sah
- 2) Alat bukti yang sah tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada minimal 2 alat bukti yang sah
- 3) Kemudian antara keterangan tanpa sumpah tersebut dengan alat bukti yang sah terdapat saling persesuaian.

2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Verbalisan

Sebelum melihat kekuatan pembuktian dari saksi verbalisan yang dikaji berdasarkan kekuatan pembuktian keterangan saksi secara umum yang diatur dalam KUHAP, perlu dilihat terlebih dahulu dari salah satu contoh kasus yang telah diuraikan sebelumnya yang menggunakan saksi

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 293

verbalisan dalam persidangan di pengadilan, apakah pemanggilan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai keterangan saksi ataukah hanya sekedar dijadikan sebagai petunjuk atau memberikan keyakinan hakim.

a. Relevansi Keterangan Saksi Verbalisan

Pada penjelasan sebelumnya, telah diuraikan secara ringkas bahwa dalam contoh kasus di atas keterangan yang disampaikan saksi verbalisan tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara yang sedang berlangsung. Kemudian akan diuraikan lebih jelas untuk mengetahui bagaimana keterkaitan keterangan yang disampaikan saksi verbalisan dengan tindak pidana yang terjadi yang kemudian akan digunakan untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari saksi verbalisan.

Pemanggilan saksi verbalisan dilakukan dengan alasan bahwa saksi dan terdakwa dipaksa, ditekan, dan dipukul pada saat proses pemeriksaan penyidikan yang menyebabkan terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP. Untuk membuktikan mengenai benar atau tidaknya telah terjadi penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik, atas inisiatif majelis hakim dihadirkanlah 3 (saksi verbalisan). Dengan mengetahui dengan langsung keterangan dari saksi verbalisan tentang proses serta cara pemeriksaan yang dilakukan penyidik, maka hakim dapat mengetahui apakah telah terjadi pemaksaan terhadap diri terdakwa

dan saksi pada saat penyidikan.⁷⁵ Namun, diantara ketiga saksi verbalisan tersebut, hanya 1 orang saksi yang dalam putusan disebut sebagai saksi verbalisan. Padahal 2 diantaranya merupakan anggota Polisi yang melakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan terhadap saksi maupun terdakwa yang juga ikut dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangannya. Walaupun demikian, keterangan yang disampaikan oleh anggota Polisi tersebut termasuk keterangan saksi verbalisan karena pengertian dari saksi verbalisan sendiri merupakan penyidik yang dijadikan saksi dalam persidangan. Jika dilihat pada keterangan yang disampaikan oleh saksi verbalisan I, keterangannya memang merupakan keterangan yang ia peroleh dari orang lain dari hasil penyidikan dan bukan keterangan yang ia lihat sendiri, dengar sendiri, dan alaimi sendiri. Dalam keterangannya juga menyebutkan bahwa ia tidak memukul ataupun mengancam saksi dan terdakwa. Sama halnya dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi verbalisan II yang mana menyebutkan keterangan mengenai ciri-ciri pelaku yang diperoleh dari orang lain dari hasil penyidikan. Pemeriksaan saksi dan terdakwa juga dilakukan dengan tanpa unsur paksaan, ancaman, maupun pemukulan. Sedangkan keterangan yang disampaikan saksi verbalisan II hanya

⁷⁵ Martua Ebenezer Pardede, **Tinjauan Yuridis tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Alat Bukti**, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010, Medan, hlm. 103

tentang ia yang tidak melakukan pemukulan dan tekanan terhadap terdakwa saat pemeriksaan tambahan.

Dari ketiga saksi verbalisan tersebut, terlihat bahwa keterangan yang disampaikan tidak benar-benar mempunyai kaitannya dengan perkara tersebut. Namun perlu dilihat kembali mengenai alasan mengapa saksi verbalisan tersebut dihadirkan di persidangan. Alasannya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa saksi verbalisan dihadirkan dengan alasan karena saksi dan terdakwa mendapat tekanan, paksaan, dan pemukulan terhadap diri mereka. Kemudian dari saksi-saksi verbalisan yang dihadirkan di persidangan juga telah menjawab mengenai benar atau tidaknya mereka melakukan kekerasan saat pemeriksaan penyidikan dan mereka mengatakan bahwa sama sekali tidak ada unsur-unsur kekerasan maupun ancaman seperti yang dikatakan oleh saksi dan terdakwa. Walaupun keterangan saksi verbalisan tersebut tidak benar-benar memiliki relevansi dengan tindak pidana yang terjadi, namun masih memiliki keterkaitan dalam proses peradilan yang menangani kasus tersebut guna memperlancar proses pemeriksaan di persidangan.

Pada prinsipnya, seorang hakim tidak boleh langsung percaya atas keterangan yang disampaikan oleh saksi verbalisan tersebut karena terdapat kemungkinan bahwa keterangan tersebut memiliki unsur kebohongan didalamnya. Oleh sebab itu, perlu

dilakukan beberapa hal untuk menghindari potensi adanya kebohongan dalam keterangan saksi verbalisan, yaitu⁷⁶:

- 1) Melakukan sumpah
- 2) Menghubungkan keterangan dari saksi verbalisan dengan alat-alat bukti yang lain
- 3) Kepercayaan atas kode etik sebagai penyidik

Sumpah dilakukan menurut agama dan kepercayaan saksi verbalisan yang bertujuan agar dalam memberikan keterangannya tidak berbohong. Diyakini dengan dilakukannya sumpah atas nama Tuhan, saksi verbalisan tidak akan menyampaikan keterangan yang palsu dengan asumsi apabila saksi memberikan keterangan bohong, maka akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Namun, sumpah saja tidak cukup untuk membuktikan adanya kebenaran dari keterangan saksi verbalisan. Oleh karena sekedar sumpah saja tidak cukup bagi hakim untuk percaya atas keterangan saksi verbalisan, maka dapat didukung dengan keterangan alat-alat bukti lainnya yang berhubungan dengan keterangan keterangan saksi verbalisan tersebut. Dengan adanya hubungan antara keterangan saksi verbalisan dengan alat-alat bukti lain, hakim akan merasa jauh lebih yakin dalam hal mempercayai keterangan saksi verbalisan. Sehingga sangat penting bagi seorang hakim untuk melakukan analisa dan mencari

⁷⁶ Dian Aryani Kusady, **Peranan Keterangan Saksi Verbalisan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 457/Pid.B/2014/Pn.Makassar)**, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016, Makasar, hlm 101

tahu mengenai keterkaitan antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan dari alat-alat bukti lainnya, guna mendapatkan sebenar-benarnya keyakinan atas kebenaran keterangan saksi verbalisan.⁷⁷

Selanjutnya mengenai kepercayaan atas kode etik sebagai penyidik. Setiap penyidik, baik penyidik dari anggota Kepolisian maupun PPNS pasti memiliki kode etik profesi sesuai dengan jabatannya. Mengenai penyidik dari anggota Kepolisian contohnya, dalam UU No. 2 Tahun 2002 dimuat ketentuan mengenai pembinaan profesi Polisi. Pembinaan profesi Polisi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Polisi dan meningkatkan profesionalisme. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa:

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memiliki kemampuan profesi.”

Pencantuman mengenai pembinaan profesi menunjukkan bahwa pembinaan profesionalisme Polisi mendapat perhatian dari pembentuk undang-undang sesuai aspirasi masyarakat yang senantiasa menginginkan peningkatan kualitas Polisi dalam melaksanakan tugas pokoknya termasuk dalam melakukan pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan.⁷⁸ Kemampuan profesi

⁷⁷ Martua Ebenezer Pardede, *Op.cit*, hlm. 105

⁷⁸ Pudi Rahardi, **Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)**, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 90.

harus dimiliki oleh pejabat Polisi agar dalam melaksanakan melaksanakan tugasnya dapat berperilaku profesioanl dan jujur dan sesuai etika profesi termasuk pula dalam hal memberikan keterangan sebagai saksi verbalisan di persidangan.

Berkaitan dengan pembinaan profesi, seluruh insan kepolisian wajib bersikap dan berperilaku yang sesuai etika. Oleh karena itu Polisi menetapkan adanya kode etik profesi yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Kepolisian. Hal itu diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

- (1) “Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi Kepolisan lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri”.

Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa bidang tugas Kepolisian sebagai profesi membawa konsekuensi adanya kode etik profesi yang berlaku bagi para pejabat Polisi dalam sikap dan perilaku bagi pelaksanaan tugas pokoknya. Kode etik profesi dapat digunakan ntuk menilai kepatuhan dan kelayakan tindakan dari segi persyaratan teknis profesi. Selanjutnya rumusan dalam Pasal 34 ayat (2) memberikan penegasan tentang adanya prinsip-prinsip

dan asas-asas serta etika profesi yang dianut dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian. Setiap pengembangan fungsi Kepolisian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing seyogianya mengembangkan prinsi, asas-asas, dan etika dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian di lingkungan kerjanya. Setiap pengembangan fungsi Kepolisian dengan sendirinya mengembangkan pula metode-metode pelaksanaan tugasnya.⁷⁹

Tuntutan atas profesionalitas dalam melaksanakan tugas Kepolisian diungkap kembali dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tersebut yang mana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa:

“Setiap Anggota Polisi wajib: c. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural.”

Beberapa ketentuan diatas menjadi salah satu contoh dari penyidik anggota kepolisian yang harus menjalankan tugasnya secara professional tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang maupun Peraturan Kapolri. Kejujuran diperlukan juga dalam melaksanakan tugasnya sebagai saksi verbalisan yang memberikan keterangannya dalam persidangan.

b. Nilai Pembuktian Keterangan Saksi Verbalisan

⁷⁹ Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 74.

Setelah melihat beberapa penjelasan mengenai penggunaan keterangan saksi verbalisan dari contoh kasus diatas, selanjutnya dapat dikaji mengenai nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisan jika dikaitkan dengan syarat-syarat seorang saksi dapat mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi verbalisan diberikan di sidang pengadilan

Pada contoh kasus diatas, saksi verbalisan memberikan keterangannya di muka pengadilan. Hal ini sudah pasti karena pemanggilan saksi verbalisan tersebut dilakukan ketika proses pemeriksaan dipengadilan sedang berlangsung dan dilakukan dengan alasan bahwa keterangan yang diutarakan saksi maupun terdakwa berbeda dengan keterangan yang disampaikan di persidangan yang menyebabkan terdakwa mencabut keterangannya. Atas dasar itulah kemudian saksi verbalisan dipanggil dan memberikan keterangannya di persidangan atas perbedaan tersebut.

- 2) Saksi mengucapkan sumpah atau janji

Setiap saksi wajib untuk disumpah, kecuali terhadap orang-orang yang dikesampingkan akan hal itu. Dalam kasus diatas, saksi verbalisan dikategorikan sebagai saksi yang disumpah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kalimat

dalam putusan yang tertulis “Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah”. Setelah kalimat tersebut, barulah kemudian tertulis mengenai keterangan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan yang mana di dalamnya termasuk keterangan saksi verbalisan. Dengan adanya hal tersebut, memberikan bukti bahwa saksi verbalisan dalam memberikan keterangannya juga menyampaikan sumpahnya di persidangan.

- 3) Keterangan saksi verbalisan mengenai tindak pidana yang terjadi disertai dengan alat bukti yang lain

Majelis hakim dalam memutuskan untuk memanggil saksi verbalisan ke persidangan karena masalah pencabutan keterangan saksi dan terdakwa dalam BAP, perlu mempertimbangkannya secara bijaksana. Salah satunya dengan melihat dan mencari hubungan setiap alat bukti, barang bukti, dan fakta-fakta selama persidangan berjalan. Dengan mencari hubungan yang ada di tiap-tiap alat bukti, barang bukti, dan fakta-fakta yang ada selama proses persidangan berjalan, hakim akan memperoleh keterangan yang berguna dalam pertimbangan untuk diterima atau tidaknya alasan pencabutan tersebut yang dikarenakan adanya tekanan, paksaan, dan pemukulan

terhadap diri saksi dan terdakwa. Selain memperoleh pertimbangan atas alasan pencabutan tersebut, hakim juga akan memperoleh keyakinan terhadap penilaian atas kesalahan terdakwa sehingga tidak muncul keraguan saat menjatuhkan hukuman.

Berdasarkan contoh kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, alat bukti yang dipergunakan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa disertai dengan barang-barang bukti seperti senjata cocor bebek dan sebagainya. Fakta-fakta dipersidangan juga tidak luput menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Alat bukti yang membuat majelis hakim yakin bahwa terdakwa adalah pelakunya yaitu berasal dari keterangan 3 orang saksi yang melihat pelaku membacok korban dengan menggunakan cocor bebek dari jarak antara 3m-20m dari tempat kejadian. Walaupun dalam putusan tersebut, keterangan saksi verbalisan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, namun munculnya keyakinan hakim bukanlah berasal dari keterangan saksi verbalisan melainkan berasal dari keterangan para saksi yang saling berhubungan.

Salah satu syarat keterangan seorang saksi mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti ialah keterangan yang diberikan harus tentang peristiwa pidana yang telah saksi dengar sendiri, lihat sendiri, atau alami sendiri dengan menyebut sumber

pengetahuannya⁸⁰. Namun dengan adanya Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 mengubah makna ketentuan tersebut menjadi keterangan yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Meskipun telah diubah dengan dikeluarkannya Putusan MK tersebut, tidak serta merta keterangan saksi verbalisan yang jelas bukan merupakan keterangan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri menjadi keterangan yang memperoleh nilai kekuatan pembuktian. Hal ini disebabkan karena juga dibutuhkan adanya korelevansi atau keterkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Mengenai relevansi antara keterangan saksi verbalisan dengan tindak pidana yang terjadi juga telah dijelaskan sebelumnya yang mana keterangan saksi verbalisan tersebut tidak benar-benar memiliki relevansi dengan tindak pidana yang terjadi, melainkan masih memiliki keterkaitan dalam proses peradilan yang menangani kasus tersebut guna memperlancar proses pemeriksaan di persidangan. Kemudian perlu dilihat kembali mengenai tujuan dari pemanggilan saksi verbalisan tersebut. Pemanggilan saksi verbalisan dalam kasus di atas bertujuan untuk memperoleh kebenaran mengenai perbedaan keterangan yang disampaikan oleh saksi dan terdakwa atas diduganya adanya unsur kekerasan saat penyidikan dulu. Oleh sebab itu, keterangan saksi verbalisan hanya memberi keyakinan pada hakim mengenai benar

⁸⁰ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 294

atau tidaknya pernyataan saksi dan terdakwa mengenai adanya unsur kekerasan saat pemeriksaan penyidikan berlangsung.

Dengan kata lain, keterangan saksi verbalisan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi. Nilai pembuktian dari keterangan saksi verbalisan hanya sebatas untuk memberi keyakinan hakim atau petunjuk mengenai benar atau tidak telah terjadi penekanan, pemaksaan, ataupun pemukulan terhadap saksi dan terdakwa dan sama sekali tidak ada relasi dengan tindak pidana yang terjadi seperti pada kasus di atas. Nilai kekuatan pembuktian dari keterangan yang disampaikan oleh saksi verbalisan yaitu bersifat bebas artinya tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Hakim harus menilai kesesuaian atau hubungannya dengan alat bukti lainnya yang juga diajukan dihadapan persidangan. Sehingga pada akhirnya keseluruhan alat bukti tersebut dapat membentuk keyakinan hakim. Kekuatan keterangan saksi verbalisan dalam penggunaannya juga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan juga harus dibantu alat bukti yang lain. Apabila keterangan saksi verbalisan sesuai dengan alat-

alat bukti yang lain, maka keterangan saksi verbalisan tersebut dapat memiliki nilai pembuktian dan dapat digunakan dalam menolak bantahan atau sangkalan saksi dan terdakwa dalam persidangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Seorang penyidik yang dijadikan sebagai saksi di persidangan (saksi verbalisan) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi seperti yang diatur di dalam KUHAP sebagaimana telah diubah maknanya dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 menjadi orang yang dapat menyampaikan keterangan dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri. Hal ini disebabkan karena dalam putusan MK tersebut lebih mementingkan adanya relevansi dengan pokok perkara yang sedang berlangsung. Sedangkan keterangan yang disampaikan oleh saksi verbalisan hanyalah keterangan terhadap pengklarifikasian benar atau tidaknya telah terjadi kekerasan saat pemeriksaan penyidikan. Namun keterangan dari saksi verbalisan tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk guna membuktikan kebenaran atas bantahan yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa terhadap isi BAP tersebut. Walaupun demikian, jika dilihat dari proses pemeriksaan saksi pada umumnya yang diatur dalam KUHAP, pemeriksaan saksi verbalisan juga dilakukan dengan tata cara seperti yang dilakukan kepada saksi pada umumnya seperti pemeriksaan identitas, mengucapkan sumpah, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan sebagainya. Meskipun ketentuan mengenai saksi verbalisan

tidak diatur dalam KUHAP ataupun peraturan perundang-undangan yang lainnya, saksi verbalisan tetap legal atau sah untuk dihadirkan di persidangan karena keterangan yang disampaikan oleh saksi verbalisan tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan juga dikarenakan proses pemeriksaan terhadap saksi verbalisan tidak jauh berbeda dengan proses pemeriksaan saksi pada umumnya serta digunakan untuk membantu jalannya proses peradilan.

2. Dalam hal mengenai nilai pembuktian dari keterangan saksi verbalisan, ditemukan bahwa keterangan saksi verbalisan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi. Hal ini dikarenakan keterangan yang diberikan oleh saksi verbalisan tidak benar-benar memiliki relevansi atau hubungan dengan tindak pidana yang terjadi, melainkan hanya menambah keyakinan hakim atas perbedaan keterangan yang diberikan oleh saksi dan terdakwa di persidangan dengan yang ada dalam BAP. Nilai kekuatan pembuktian dari keterangan yang disampaikan oleh saksi verbalisan tersebut yaitu bersifat bebas artinya tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan, semua tergantung kebijaksanaan hakim. Hakim juga harus menilai kesesuaian atau hubungannya dengan alat bukti lainnya yang juga diajukan dihadapan persidangan. Sehingga pada akhirnya keseluruhan alat bukti tersebut dapat membentuk keyakinan hakim. Kekuatan keterangan saksi verbalisan dalam penggunaannya juga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan juga harus dibantu alat bukti yang lain.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan mengenai saksi verbalisan terutama mengenai tata cara pemanggilan dan batasan seorang saksi verbalisan dapat memberikan keterangannya agar keterangan yang diberikan oleh saksi verbalisan tersebut tidak melewati batas-batas kewenangannya dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya serta memiliki dasar hukum yang mengikat
2. Dalam melakukan proses pemeriksaan saat penyidikan, penyidik hendaknya mengantisipasi akan terjadinya perbedaan keterangan yang nanti disampaikan dengan keterangan yang di BAP dengan melakukan perekaman tanpa rekayasa pada saat proses pemeriksaan berlangsung agar dapat lebih meyakinkan saat nanti dibutuhkan
3. Penetapan status tersangka dengan bukti-bukti yang cukup juga harus diperhatikan dengan hati-hati dan teliti oleh penyidik pada saat proses penyidikan berlangsung karena hal ini merupakan titik awal berjalannya suatu perkara
4. Kerjasama antar lembaga penegak hukum juga diperlukan dan hendaknya dilaksanakan dengan baik dan profesional agar keadilan yang ingin dicapai juga dapat terlaksana
5. Masyarakat hendaknya sadar untuk ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum, terutama dalam hal dirinya dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara sebab setiap orang memiliki hak-haknya untuk dapat menjadi seorang saksi yang tentunya dilindungi oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/LITERATUR

Abdoel Djamali, **Pengantar Hukum Indonesia**, PT. Raja Grafindo Presda,
Jakarta, 2010

Adami Chazawi, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Bayumedia
Publishing, Malang, 2011

Alfitra, **Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di
Indonesia**, Raih Asa Sukses (RAS), Jakarta, 2012

Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi**, Cetakan Ketiga,
Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Andi Sofyan, **Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar**, Kencana Prenadamedia
Group, Jakarta, 2014

Antonius Sujata, **Reformasi Penegakan Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo, Jakarta,
1998

Barda Nawawi, **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan
dengan Pidana Penjara**, Citra Kencana, Semarang, 1994

Darwan Prinst, **Hukum Acara Pidana Dalam Praktik**, Djambatan, Jakarta, 1998

Dzulkifli Umar dan Jimmy P., **Kamus Hukum (*Dictionary of Law*)**, Grahamedia
Press, Surabaya, 2012

Hartono, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Jimly Ashiddiqie, **Hukum Acara Pengujian Undang-Undang**, SinarGrafika, Jakarta, 2010

Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Malang, 2008

Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Mardjono Reksodiputro, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Kumpulan Tulisan UI, Jakarta, 1993

M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

-----, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Pudi Rahardi, **Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)**, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**,
Balai Pustaka, Jakarta, 2005

R. Soesilo, **Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)**, Cetakan Ketiga, Politeia, Bogor, 2005

Subekti, **Hukum Pembuktian**, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001

Tolib Effendi, **Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan di Beberapa Negara)**, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2013

Winarno Soerakhmat, **Dasar dan Teknik *Research***, Tarsito, Bandung, 1982

SKRIPSI

Martua Ebenezer Pardede, **Tinjauan Yuridis tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Alat Bukti**, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010, Medan, hlm. 103

Dian Aryani Kusady, **Peranan Keterangan Saksi Verbalisan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 457/Pid.B/2014/Pn.Makassar)**, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016, Makasar, hlm 101

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

INTERNET

I Dewa GD. Saputra Valentino Pujana, **Jaminan Kekebalan Hukum Bagi Saksi**

Pelaku/Justice Collaborator, 2013, E-journal (online),

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2453>,

diakses 13 November 2017, pukul 10.14

Kejaksaan, diakses dari http://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1 pada 13 November 2017 pukul 10.05

Rakhmatulloh, Yusril: *Tidak Patut Penyidik Dihadirkan sebagai Saksi*,

<https://nasional.sindonews.com/read/1028162/13/yusril-tidak-patut->

[penyidik-dihadirkan-sebagai-saksi-1438354535](https://nasional.sindonews.com/read/1028162/13/yusril-tidak-patut-penyidik-dihadirkan-sebagai-saksi-1438354535), diakses 13 November

2017 pukul 10.10